

**PEMANFAATAN TANAH WAQAF PERKUBURAN UNTUK  
LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DITINJAU MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah  
Kabupaten Rokan Hilir)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**



**OLEH**

**M. AMIRUL MUKMININ**  
**NIM : 10421025038**

**PROGRAM S1  
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Lahan Perkebunan Sawit Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir)* dengan latar belakang yaitu tanah wakaf yang ada di dalam kasus di atas adalah tanah wakaf yang akadnya merupakan akad tanah wakaf perkuburan. Namun karena tanah perkuburan masyarakat masih ada dan belum habis dimanfaatkan maka pengurus wakaf (nazir wakaf) memanfaatkannya menjadi lahan perkebunan sawit. Hal ini yang kemudian dipermasalahkan oleh masyarakat terutama ahli waris para wakif yang telah meninggal tentang kebolehan pemanfaatan tanah yang mereka anggap telah menyalahi aturan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah penulis mencoba melihat dengan kacamata hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf perkuburan untuk lahan perkebunan sawit. Ada dua permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu (1) Faktor Pertimbangan Nazir Wakaf Dalam Pemanfaatan Fungsi Tanah Wakaf Perkuburan sebagai lahan perkebunan sawit (2) Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Keputusan Nazir Wakaf Dalam Pemanfaatan Tanah Wakaf (3) Analisis Hukum Islam.

Tipe penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis meneliti dengan mewawancarai langsung pelaku kasus dan orang yang ikut andil di dalamnya sehingga penulis mendapatkan gambaran yang jelas tentang kasus tersebut dengan bahan-bahan penelitian berupa hasil wawancara dan pengamatan mendalam serta bahan-bahan perpustakaan atau data sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif terhadap data primer dan sekunder. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh masyarakat dan agama di kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya dalam penetapan jumlah sampel penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu peneliti menetapkan sendiri jumlah sampel dari populasi yang ada. Dari seluruh populasi yang ada, penulis mengambil sampel sebanyak 20 orang yang terdiri dari masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus wakaf, pengurus masjid, wakif dan ahli waris dari wakif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Faktor pertimbangan nazir wakaf dalam pemanfaatan tanah wakaf perkuburan menjadi lahan perkebunan sawit karena masih ada tanah perkuburan masyarakat yang kosong dan belum dimanfaatkan sepenuhnya. (2) Walaupun ada di antara ahli waris wakif yang menentang, namun masyarakat beranggapan bahwa keputusan pengurus wakaf dalam memanfaatkan tanah wakaf sudah benar adanya. Karena dengan memanfaatkan tanah wakaf tersebut sebagai lahan perkebunan sawit pengurus masjid telah menyelamatkan aset agama dari ke sia-siaan. (3) Ulama berbeda pendapat tentang pemanfaatan tanah wakaf namun sebagian besar dari mereka sepakat bahwa pemanfaatan tanah wakaf yang berbeda dengan akadnya boleh saja dilakukan jika hal tersebut harus dilakukan. Dari penelitian penulis tentang kasus yang terjadi di lokasi penelitian penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Lahan Perkebunan Sawit di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode dan Waktu Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II : LOKASI PENELITIAN**

A. Letak Geografis .....	17
B. Kondisi Demografis .....	18
C. Kondisi Pendidikan .....	21
D. Kondisi Agama (Keyakinan) .....	23
E. Kondisis Perekonomian .....	26
F. Sosial dan Budaya .....	29
G. Kondisi Tanah Wakaf Di Kepenghuluan Bagan Batu.....	30

### **BAB III : WAKAF DALAM ISLAM**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf .....	33
B. Syarat dan Rukun .....	41
C. Macam-Macam Wakaf .....	42
D. Tujuan Wakaf .....	43
E. Pendapat Ulama tentang Masalah Wakaf .....	44
F. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia .....	53
G. Pelaksanaan Wakaf Di Rokan Hilir.....	54

#### **BAB IV : PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERKUBURAN UNTUK PERKEBUNAN SAWIT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Faktor Keputusan Nazir Wakaf Dalam Pemindahan Pemanfaatan Tanah Wakaf Perkuburan Untuk Perkebunan Sawit di Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir .....	55
B. Pandangan Masyarakat tentang Keputusan Nazir Wakaf Dalam Pemanfaatan Tanah Wakaf Perkuburan untuk Perkebunan Sawit di Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir .....	59
C. Analisis Hukum Islam .....	63

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-Saran .....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepenghuluan Bagan Batu merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Masyarakat di daerah ini terdapat heterogen suku bangsa seperti suku Jawa, Batak, Melayu, Minang dan suku bangsa kulit putih yaitu suku bangsa Tionghoa (Cina). Suku bangsa yang berdomisili adalah suku bangsa Batak dan Jawa. Batak dan Jawa merupakan suku pendatang, sementara pribumi di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adalah suku Melayu<sup>1</sup>.

Masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tidak menjiwai adat<sup>2</sup> dan tradisi<sup>3</sup> daerah setempat seperti percaya kepada keris, jimat atau benda-benda lain yang dianggap keramat, karena masyarakat di daerah ini tergolong masyarakat yang maju dan melihat dan menilai sesuatu sesuai akal dan logis. Sesuatu yang tidak diterima akal dan logika, maka sesuatu dianggap tidak ada (mustahil).

---

<sup>1</sup> Sukatno (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Bagan Batu tanggal 13 Juni 2009.

<sup>2</sup> Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dituntut atau dilakukan sejak dahulu kala; kebiasaan cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; cukai menurut peraturan yang berlaku (di Pelabuhan dan sebagainya); wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hokum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu system. Lihat Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Karya Abditama, 2001), cet. Ke-1, hal. 14.

<sup>3</sup> Tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus dilakukan oleh masyarakat disetiap tempat atau suku berbeda-beda. Lihat J.S. Badudu Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), cet. Ke-1, hal. 1531.

Di samping itu, karena daerah ini adalah daerah yang banyak ditanami perkebunan sawit, sehingga peneliti menemukan sebuah perilaku masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf sebagai lahan untuk ditanami perkebunan sawit. Perilaku tersebut ditemukan di Kecamatan Bagan Sinembah khususnya di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam Islam *wakaf* berasal dari bahasa Arab-dengan asal kata “*waqofa – yaqifu – waqfan- wuquufan*” mengandung makna berdiri atau berhenti<sup>4</sup>.

Dalam Kamus Istilah Agama Islam Lengkap menjelaskan bahwa wakaf adalah sesuatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil faedahnya di jalan kebaikan oleh orang lain, tidak boleh dijual, diberikan dan tidak boleh dipusakakan<sup>5</sup>.

Kata *wakaf* juga ditemukan dalam istilah ilmu tajwid, yaitu menghentikan bacaan pada akhir kalimat, untuk mengambil nafas agar dapat melanjutkan bacaan selanjutnya, atau untuk berhenti terus<sup>6</sup>.

Wakaf juga diartikan sebagai perbuatan menghentikan dan menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat di gunakan untuk mencari ridho Allah s.w.t <sup>7</sup>. Oleh

---

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), cet. Ke-3, hal. 505.

<sup>5</sup> NA. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Jakarta:Penerbit Indah. 1996), cet. Ke-5, hal. 480.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1984) cet. Ke-2 hal.207.

karena itu seseorang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak atas harta tersebut, karena hartanya telah diperuntukkan manfaatnya untuk orang lain.

Wakaf merupakan salah satu perbuatan yang sangat ditekankan dan dianjurkan oleh Islam dan merupakan amal kebaikan yang pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan dapat memberi manfaat bagi orang lain

Membahas masalah wakaf, Allah Swt berfirman dalam al-Quranul Karim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”<sup>8</sup> (TQS. al-Hajj [22]: 77)

Dalil di atas telah menjelaskan tentang:

1. Allah Swt menyerukan orang-orang beriman untuk , ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan
2. Perintah berbuat baik sejalan dengan perintah penghambaan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu, seseorang yang berbuat baik tentunya didasari dan dimotivasi karena ketundukannya kepada perintah dan larangan Allah Swt-karena di dasari oleh motivasi ideal seorang muslim semata-mata mengharapkan Ridho Allah SWT.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Syamil Cipta Media, 2005), cet. Ke-2, hal. 341.

3. Orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan berbuat kebajikan lainnya disunnahkan oleh Allah dan Rasulullah Saw dengan motivasi karena Allah Swt semata, maka seseorang akan memperoleh keberuntungan. Tentunya keberuntungan itu tidak hanya di dunia, melainkan kehidupan yang kekal dan abadi.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”<sup>9</sup>. (TQS. al-Imran [3]: 92)

Dalil di atas menjelaskan dan terdapat beberapa catatan penting sebagai warning bagi manusia secara umum dan seorang mukmin khususnya, yaitu :

1. Seseorang tidak akan mendapat *al-birra* (kebaikan) sehingga ia menginfakkan apa-apa yang dicintai sampai kapan pun. Akan tetapi, jika seseorang menginginkan dan mengharapkan *al-birra* (kebaikan) tersebut, ia harus mengeluarkan sesuatu yang dicintai untuk Allah Swt. Ungkapan “*sampai kapan pun*” karena permulaan surat al-Imran ayat 92 ditemukan huruf ‘*nashab*’ dan selanjutnya “*fiil mudhari*””. Dalam ilmu tata bahasa

---

<sup>9</sup> Ibid. hal. 212.



Arab, ketika huruf '*nashab*' dan selanjutnya "*fiil mudhari*" menyatakan untuk selamanya. Contoh yang sama dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 120<sup>10</sup>.

2. Ayat di atas pada dasarnya bersifat umum dan tidak secara spesifik menjelaskan kata wakaf, tetapi infaq. Namun, berdasarkan beberapa definisi wakaf yang ditemukan di atas secara umum menjelaskan bahwa seseorang mengeluarkan sebagian harta untuk diambil manfaat dari dzatnya dengan tujuan kebaikan. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan sebagai dalil menjelaskan wakaf, karena seseorang seseorang yang mengharapkan kebaikan dari Allah Swt hendaknya mengeluarkan sesuatu yang dicintai. Hal ini relevan dengan dalil Syara' "*Ibrah dari keumuman lafadz bukan kekhususan sebab*".

Adapun syarat dan rukun wakaf adalah sebagai berikut :

1. yang berwakaf (*waqif*), syaratnya adalah
  - a. Berhak berbuat kebaikan walau bukan Islam sekalipun.
  - b. Dengan kehendak sendiri, tidak sah karena dipaksa orang.
2. Suatu yang diwakafkan
  - a. Kekal dzatnya, berarti diambil manfaatnya-dzat barang tidak rusak.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta:IAIN Jakarta, 1984) cet. Ke-2 hal. 208.

- b. Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun musya' (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan lain).
- 3. Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu)
- 4. Lafadz<sup>11</sup>.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadan dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Sementara itu pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya.

Dalam PP Nomor 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Harta benda yang sudah diwakafkan tidak digunakan kembali untuk keperluan pribadi, anggota keluarga si wakif. Jelasnya dalam Pasal 40 UU Nomor 41/2004, dikatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. Dhibahkan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 325.

- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar, dan
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya<sup>12</sup>.

Selain itu, pada dasarnya terhadap harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain, dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 225 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 225 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>13</sup>

Setelah peneliti telusuri, tanah wakaf yang dijadikan sebagai perkebunan sawit tersebut adalah tanah yang diwakafkan dengan akad tanah perkuburan. Akan tetapi, lahan tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan akad yang disyaratkan oleh para waqif diawal mewakafkan tanah tersebut<sup>14</sup>. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Abdul Wahab, tanah wakaf yang ada di kepenghuluan bagan batu adalah tanah yang di wakafkan oleh masyarakat dengan berbagai maksud. Adapun status tanah wakaf tersebut tidaklah bersifat resmi karna tidak ada pencatatan terhadap

---

<sup>12</sup>Departemen Agama, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Rajawali Press, 2007) cet. Ke-1 hal.46.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2007) cet. Ke-5 hal. 105.

<sup>14</sup> Abdul Wahab (Nazir Wakaf), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 15 Juni 2009.

tanah wakaf yang di wakafkan ke masjid. Yang ada hanyalah pengurus mesjid, nazir wakaf dan masyarakat yang mengetahui keberadaan tanah wakaf yang ada di desa mereka<sup>15</sup>. Adapun letak tanah dan kondisi tanah wakaf perkuburan tersebut sebagai berikut.

a. Tanah wakaf Bapak khairi.

Tanah yang berukuran 1540m<sup>2</sup> terletak di *afgling*<sup>16</sup> 10 blok 2 ini di wakafkan pada tahun 1998 ketika bapak Khairi dan keluarga baru saja pindah ke RT 02 kepenghuluan bagan batu kecamatan bagan sinembah. Tanah tersebut di wakafkan ke masjid Baiturrahman dan diterima oleh ketua pengurus masjid yaitu bapak Maksum Ihsan dengan akad lisan dan penyerahan sertifikat tanah.<sup>17</sup>

b. Tanah wakaf Bapak Suparyogi.

Tanah ini berukuran lebih besar yaitu 2000 m<sup>2</sup> terletak di *afgling* 5 blok 7 di wakafkan oleh Bapak Suparyogi pada tahun 2005 kepada masjid baiturrahman dengan akad tanah perkuburan dengan pertimbangan bahwa populasi masyarakat yang semakin bertambah sehingga di butuhkan tanah perkuburan yang lebih besar.<sup>18</sup>

Namun pada prakteknya tanah tersebut kini di jadikan lahan perkebunan sawit oleh nazir wakaf atas keputusan pengurus masjid Baiturrahman. Hal ini lalu mengundang kritikan dari sanak keluarga dan kerabat wakif yang kurang setuju dengan inisiatif pengurus masjid Baiturrahman. Mereka kecewa dan menganggap bahwa pengurus Masjid Baiturrahman telah menyia-nyiakan wakaf dari saudara mereka.<sup>19</sup>

Di sisi lain, pertimbangan para nazir wakaf di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir menjadikan tanah tanah

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab (Nazir Wakaf), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 21 juni 2010.

<sup>16</sup> Sebutan untuk lorong-lorong yang ada dalam daerah perkebunan sawit.

<sup>17</sup> Sugito (Ahli Waris), *wawancara*, Bagan Batu tanggal 20 Juni 2010.

<sup>18</sup> Supiaryogi (Waqif), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 23 Juni 2010.

<sup>19</sup> Mustoleh(adik wakif), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 23 Juni 2010

wakaf perkuburan untuk perkebunan sawit karena beberapa alasan yang mendasar, adalah sebagai berikut :

1. Lahan Perkuburan masyarakat sudah ada.  
Dasar ini menjadi faktor nazir wakaf di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk perkebunan sawit. Selanjutnya, para nazir yang juga merupakan pengurus dalam Ikatan Kematian Kepenghuluan Bagan Batu, lahan perkuburan yang ada masih bisa digunakan sebagai lahan perkuburan.
2. Tanah Wakaf Perkuburan tersebut tidak dimanfaatkan.  
Alasan yang kedua ini merupakan faktor mendasar para nazir wakaf di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir mengalihkan atau memanfaatkan tanah wakaf perkuburan dari masyarakat untuk perkebunan sawit. Lanjutnya, bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya mendapatkan pahala dari apa yang diwakafkan selama harta yang telah diwakafkan dimanfaatkan oleh manusia. Artinya-seseorang tidak memperoleh pahala dari apa yang diwakafkan ketika harta tersebut tidak difungsikan oleh manusia<sup>20</sup>.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir-hasil dari pemanfaatan tanah wakaf perkuburan yang dijadikan sebagai perkuburan sawit digunakan untuk kemashlahatan umat, di antaranya dialokasikan untuk biaya kesejahteraan nazir Masjid, Mushalla yang ada di Kepenghuluan Bagan Batu. Lanjutnya, hasil perkebunan sawit dari tanah wakaf perkuburan dipergunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi Masjid dan Mushalla, pembangunan fasilitas Pendidikan Agama khususnya seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan lain sebagainya<sup>21</sup>.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan bagi penulis adalah hak untuk menanam sawit di atas lahan yang akadnya sebagai tanah perkuburan adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud dari waqif. Di sisi lain,

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab (Nazhir Waqaf), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 15 Juni 2009.

<sup>21</sup> Muhammad Suyitno (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 14 Juni 2009.

tindakan nazir wakaf yang menjadikan tanah wakaf perkuburan sebagai perkebunan sawit ternyata mengundang kritikan dari pihak ahli waris yang berwakaf. Mereka merasa apa yang telah diniatkan oleh saudaranya tidak sejalan dengan niat awal tanah tersebut diwakafkan<sup>22</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERKUBURAN UNTUK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”** (Studi Kasus Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir)

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih terarah dan mengarah kepada sasaran yang diinginkan, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Permasalahan yang diteliti tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Perkuburan untuk Perkebunan Sawit di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

## **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan merumuskan dan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Apa-apa saja faktor pertimbangan nazir wakaf dalam pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan?

---

<sup>22</sup> Sugito (Ahli Waris), *wawancara*, Bagan Batu tanggal 17 Juni 2009.

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keputusan nazir wakaf dalam pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan untuk perkebunan sawit di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akad perwakafan antara wakif dan penerima di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui tujuan pemanfaatan tanah wakaf untuk lahan perkebunan sawit di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk lahan perkebunan sawit di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah wawasan bagi masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten

Rokan Hilir, dan kontribusi ilmiah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Sebagai khazanah ilmiah dan ilmu pengetahuan khususnya tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk perkebunan sawit di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

## **E. Metode dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi ini prioritas peneliti karena terinspirasi dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf untuk perkebunan sawit di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Di samping itu, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat mencerahkan masyarakat, sekiranya hasil penelitian yang akan dilaksanakan bertentangan dengan hukum syara' sejatinya masyarakat menghindari dan menjauhkan praktek tersebut.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Melayu di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.



Adapun yang menjadi objek penelitian adalah tanah wakaf yang dialihkan fungsinya menjadi lahan perkebunan sawit di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh masyarakat dan agama di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya dalam penetapan jumlah sampel dari penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Peneliti menetapkan sendiri jumlah sampel dari populasi yang ada. Jadi, sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang terdiri dari pihak-pihak yang terkait.

### **4. Sumber Data**

#### **a.Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari lapangan, seperti wakif, nazir, dan tokoh masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

#### **b.Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti melalui kajian literatur perpustakaan dan hal lain yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah wakaf untuk lahan perkebunan sawit

di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

### **a.Observasi**

Metode ini dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan dan melihat, menganalisis dan mengkaji pemanfaatan tanah wakaf untuk lahan perkebunan sawit di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

### **b.Wawancara**

Wawancara adalah metode kedua yang penelitian gunakan dalam mengumpulkan data di lapangan. Wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan dan mengikat masyarakat atau responden tentang objek kajian penelitian.

### **c.Kajian Perpustakaan**

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan stimulus-stimulus yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

### **d.Pengamatan Mendalam**

Penulis mengamati secara mendalam perilaku masyarakat yang menggunakan tanah wakaf yang akadnya adalah wakaf tanah

perkuburan dengan melihat langsung keadaan yang terjadi di masyarakat dan tanggapan masyarakat tentang keadaan tersebut.

## **6. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual masyarakat kepenghuluan bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah dalam proses dan pemanfaatan tanah wakaf perkuburan yang ada.

## **7. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih tersistematiskannya penelitian perlu diadakan Sistematika Penelitian agar arah dan tujuan penelitian jelas. Oleh karena itu sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan waktu penelitian serta sistematika penelitian.
2. Bab kedua, merupakan bab gambaran umum tentang Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, terdiri dari letak demografis dan geografis, tingkat pendidikan dan agama, perekonomian, sosial budaya.
3. Bab ketiga, wakaf dalam Islam (hukum pemanfaatan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan akad awal)

4. Bab keempat, bab pembahasan berisi tentang pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan.
  - a. Faktor yang menjadi pertimbangan nazir wakaf.
  - b. Pandangan masyarakat terhadap keputusan nazir.
  - c. Tinjauan hukum Islam.
5. Bab kelima, bagian kelima dari penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dari fenomena yang diteliti serta saran-saran.

## **BAB II**

### **KEPENGHULUAN BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

#### **A. Letak Geografis**

Kepenghuluan Bagan Batu merupakan salah satu Kepenghuluan dari sekian banyak kepenghuluan yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Daerah ini berdataran tinggi dan dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit. Mayoritas masyarakat Bagan Batu memiliki perkebunan sawit sendiri. Berdasarkan keterangan Kepala Kepenghuluan Bagan Batu, dimana daerah ini merupakan daerah kedua yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir yang mengalami perkembangan dan kemajuan dengan cepat, setelah Bagansiapiapi yang merupakan ibukota Kabupaten, jika dibandingkan dengan Kepenghuluan lainnya yang ada di Kabupaten Rokan Hilir<sup>1</sup>.

Adapun jarak antara Kepenghuluan Bagan batu dengan pusat pemerintahan Kecamatan yaitu Kecamatan bagan sinembah adalah  $\pm 3$  Kilometer, sementara jaraknya dengan pemerintahan Kabupaten  $\pm 70$  Kilometer, dan jarak antara Kepenghuluan Bagan Batu dengan pemerintahan Provinsi  $\pm 135$  Kilometer<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sumber Data: Monografi Kepenghuluan Bagan Batu, tahun 2009.

<sup>2</sup> Sumber Data: Monografi Kepenghuluan Bagan Batu, tahun 2009.

Secara geografis, luas wilayah Kepenghuluan Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adalah seluas 86.107 Km<sup>2</sup>, dengan bentuk topografi tanah berbentuk daratan. Sedangkan batas-batas daerahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Harapan Makmur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara<sup>3</sup>.

## **B. Kondisi Demografis**

Kepenghuluan Bagan Batu merupakan kepenghuluan yang mengalami kemajuan dan perkembangan sangat pesat dari tahun ke tahun. Baik perkembangan jumlah penduduk. Berdasarkan data statistik tahun 2009, tercatat jumlah penduduk Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 24.849 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 5.830 KK. Hal ini dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Sumber Data: Monografi Kepenghuluan Bagan Batu tahun 2009.

**TABEL 1**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

<b>NO</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>FREKUENSI</b>	<b>PERSENTASE</b>
1	Laki-Laki	12.968	52,19%
2	Perempuan	11.881	47,81%
<b>Jumlah</b>		<b>24.849</b>	<b>100%</b>

Sumber data: Kepenghuluan Bagan Batu Tahun 2009.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah penduduk Kepenghuluan Bagan Batu berdasarkan jenis kelamin laki-laki terlihat lebih besar dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Di tabel 2.1 di atas tercatat bahwa jenis kelamin laki berjumlah 12.968 jiwa dengan persentase 52,19% (persen), dan perempuan berjumlah 11.881 jiwa dengan persentase 24,849% (persen).

Di samping itu, dengan banyaknya jumlah penduduk dan persentase penduduk Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, pada kenyataannya terdapat berbagai macam suku bangsa di daerah tersebut, yaitu suku Melayu, Jawa, Batak, Minang, Sunda, Batak Mandailing dan Tionghoa (Cina). Adapun suku pribumi (penduduk asli) Kepenghuluan Bagan Batu adalah suku Jawa dan Batak. Sementara yang lainnya merupakan suku pendatang. Akan tetapi, tidak menjadi penghambat terjalinnya semangat persatuan antar suku di daerah tersebut.

Adapun faktor penyebab banyaknya suku pendatang yang berdomisili di Kepenghuluan Bagan Batu karena daerah ini pada fakta merupakan daerah yang subur dan memiliki potensi yang sangat besar sebagai lahan perkebuan serta merupakan daerah yang strategis dalam mengembangkan bisnis karena jaraknya tidak jauh dari Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu, dapat dikatakan pesatnya penduduk di Kepenghuluan Bagan Batu karena dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 2**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN SUKU BANGSA**

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Melayu	2.035	8,19%
2	Batak	8.921	35,90%
3	Jawa	9.632	38,67%
4	Minang	358	1,44%
5	Sunda	179	0,72%
6	Batak Mandailing	3.438	13,84%
7	Tionghoa (Cina)	286	1,15%
<b>Jumlah</b>		<b>24.849</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Kepenghuluan Bagan Batu Tahun 2009.

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas suku bangsa yang berdomisili di Kepenghuluan Bagan Batu adalah suku Jawa dengan jumlah penduduk sebesar 9.632 jiwa dengan persentase 38,67% (persen), selanjutnya suku Batak dengan jumlah penduduk 8.921 jiwa dengan persentase 35,90% (persen). Sementara suku bangsa yang minoritas di daerah ini adalah suku Sunda dengan jumlah penduduk sebesar 179 jiwa dengan persentase 0,72% (persen) selanjutnya diikuti oleh suku Tionghoa (Cina) dengan jumlah penduduk sebesar 286 dengan persentase 1,15% (persen).



Di samping itu, dengan heterogenya suku bangsa di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, memberikan pengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan daerah tersebut. Di sisi lain, perkembangan dan kemajuan yang dimiliki Kepenghuluan Bagan Batu merupakan sumbangsih pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena berdasarkan letak geografis daerah ini berdekatan dengan Provinsi tersebut.

### **C. Kondisi Pendidikan**

Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kepenghuluan mengalami kemajuan dan perkembangan dalam berbagai aspek, di antaranya kemajuan dari sumber daya manusia (SDM). Kemajuan sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari kemajuan pendidikan yang dimiliki. Adapun kemajuan pendidikan dapat diukur dari banyaknya penduduk yang memperoleh dan menuntaskan pendidikan.

Akan tetapi, kemajuan pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh berdirinya sarana pendidikan yang memadai. Hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintahan dalam mendukung dan mensukseskan dunia pendidikan. Adapun peran pemerintahan dalam mendukung dan mensukseskan dunia pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS).
2. Memberikan Beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
3. Memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
4. Memberikan penghargaan dan insentif yang layak dan mencukupi kepada tenaga pengajar.

5. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan cara memberikan training dan pembelajaran praktis agar pendidik memiliki pemahaman luas dan ilmu sehingga tenaga pengajar siap dan memiliki percaya diri dalam mendidik dan memberikan ilmu kepada peserta didiknya.

Jika dilihat faktanya di lapangan, maka banyaknya sarana pendidikan yang didikan baik berstatus swasta yang merupakan komitemn masyarakat atau individu terhadap dunia pendidikan maupun berstatus negeri yang merupakan milik pemerintah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 3**  
**SARANA PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>SARANA PENDIDIKAN</b>	<b>VOLUME</b>
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	11
2	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	8
3	Sekolah Dasar Swasta (SDS)	5
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	3
5	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	4
6	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	1
7	Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS)	3
8	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)	4
9	Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN)	1
10	Sekolah Menengahh Atas Swasta (SMAS)	1
11	Madrasah Aliyah Swasta (MAS)	4
12	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>

Sumber data: Kepenghuluan Bagan Batu Tahun 2009.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sarana pendidikan yang di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdapat 48 buah saran pendidikan, dengan rincian 11 (sebelas) buah Taman Kanak-Kanak (TK), 8 (delapan) buah Sekolah Dasar Negeri (SDN), 5

(lima) buah Sekolah Dasar Swasta (SDS), 3 (tiga) buah Madrasah Ibtidaiyah (MI), 4 (empat) buah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 3 (tiga) buah Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), 4 (empat) buah Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) 1 (satu) buah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), 1 (satu) buah Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS), 4 (empat) buah Madrasah Aliyah Swasta (MAS)<sup>4</sup>.

Dengan banyaknya sarana pendidikan, merupakan salah satu faktor penunjang dalam dunia pendidikan. Sehingga dengan majunya pendidikan merupakan faktor penunjang dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) suatu daerah.

#### **D. Kondisi Agama (Keyakinan)**

Agama adalah himpunan doktrin ,ajaran,serta hukum-hukum yang telah baku yang diyakini sebagai kodifikasi perintah tuhan untuk manusia <sup>5</sup>. Meskipun ditemukan adanya konsep pemikiran yang tidak mengakui keberadaan Pencipta (Khaliq), seperti konsep pemikiran yang diemban oleh masyarakat komunis ateis. Hal ini merupakan bentukan penapian dan menyalahi fitrah dan kodrat yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang beragama, meskipun agama yang dianut berbeda-beda.

---

<sup>4</sup> Sumber Data: Kepenghuluan Bagan Batu Tahun 2009.

<sup>5</sup> Hakim , Atang Abd & Mubarak , Jaih . *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) cet. Ke-4 hal. 3

Masyarakat Kepenghuluan Bagan Batu merupakan masyarakat yang memiliki keyakinan (masyarakat yang beragama). Meskipun faktanya di tengah interaksi sosial di masyarakat ditemukan berbagai keyakinan beragama ada. Minimal hal ini sudah merupakan bentuk keselarasan atau sesuainya dengan fitrah dan kodrat dari manusia.

Adapun keyakinan (agama) terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 4**  
**PENDUDUK BERDASARKAN KEYIKANAN (AGAMA)**

NO	KEYAKINAN (AGAMA)	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Islam	15.105	60,79%
2	Kristen	9.279	37,34%
3	Hindu	183	0,74%
4	Budha	282	1,13%
<b>Jumlah</b>		<b>24.849</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Kepenghuluan Bagan Batu 2009.

Berdasarkan tabel di atas penduduk berdasarkan keyakinan (agama) dapat dilihat bahwa penduduk yang memeluk agama Islam sebesar 15.105 jiwa dengan persentase 60,79% (persen), Kristen sebesar 9.279 jiwa dengan persentase 37,34% (persen), Hindu sebesar 183 jiwa dengan persentase 0,74% (persen) dan Budha sebesar 282 jiwa dengan persentase 1,13% (persen).

Dari beberapa bentuk keyakinan (agama) di Kepenghuluan Bagan Batu, ternyata Islam merupakan agama atau keyakinan yang mayoritas diyakini oleh masyarakat dan Hindu merupakan agama atau keyakinan yang minoritas diyakini oleh masyarakat.

Di samping itu, untuk melihat dan mengukur hidupnya suasana beragama di tengah-tengah masyarakat, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh tingkat pemakmuran sarana ibadah yang ada. Oleh karena itu, peneliti dalam tulisan ini akan menampilkan sarana-sarana ibadah yang terdapat di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

**TABEL 5**  
**SARANA IBADAH**

<b>NO</b>	<b>SARANA IBADAH</b>	<b>VOLUME</b>
1	Masjid	25
2	Mushalla	18
3	Gereja	22
4	Vihara	1
5	Wihara	1
<b>Jumlah</b>		<b>67</b>

Sumber Data: Kepenghuluan Bagan Batu Tahun 2009.

Dari tabel di atas terlihat banyaknya sarana ibadah yang terdapat di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun sarana ibadah berupa Masjid sebanyak 25 buah, Mushalla sebanyak 18 buah, Gereja sebanyak 22 buah, Vihara sebanyak 1 buah dan Wihara sebanyak 1 buah.

Jika dilihat ternyata sarana ibadah yang banyak terdapat di Kepenghuluan Bagan Batu adalah Masjid. Hal ini merupakan suatu hal yang logis karena didukung dengan banyak penduduk yang memiliki keyakinan beragama Islam di daerah tersebut.

### E. Kondisi Perekonomian

Berdasarkan kondisi geografis Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang berdataran tinggi dan subur. Umumnya masyarakat yang berdomisili di daerah yang subur bermata pencaharian sebagai petani. Jika diperhatikan terdapat berbagai macam jenis mata pencaharian masyarakat di kecamatan tersebut. Untuk lebih jelas, dapat diperhatikan tabel di bawah ini:

**TABEL 6**  
**PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN**

NO	MATA PENCAHARIAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Petani	9.940	40%
2	Pedagang	5.715	23%
3	POLRI/ TNI	621	2,5%
4	Pegawai Negari Sipil (PNS)	1.739	7%
5	Buruh	2.851	15,5%
6	Belum Bekerja	2.983	12%
<b>Jumlah</b>		<b>24.849</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Kepenghuluan Bagan Batu Tahun 2009.

Jika uraikan dari tabel di atas maka ada beberapa jenis mata pencaharian (profesi) penduduk di Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

#### 1. Petani

Dari tabel di atas ternyata jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebesar 9.940 jiwa dengan persentase 40% (persen). Mata pencaharian sebagai petani merupakan mata pencaharian yang mayoritas penduduk di daerah ini. Karena petani merupakan profesi yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Seperti pengamatan yang dilakukan peneliti, adanya penduduk yang berprofesi sebagai PNS tapi dia juga seorang petani, dan lain sebagainya.

Adapun profesi sebagai petani di daerah ini adalah kebun. Hal ini karena didukung oleh faktor tingginya tanah yang terdapat di Kepenghuluan Bagan Batu. Ada beberapa bentuk tanaman yang ditanamani masyarakat di perkebunannya, yaitu sawit, karet dan tanaman lain seperti sayur-sayuran, cabe, pisang dan lain sebagainya.

## 2. Pedagang

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Bagan Batu yang bermata pencaharian sebagai pedagang berjumlah 5.715 jiwa dengan persentase 23% (persen). Ada beberapa jenis perdagangan yang diperjual belikan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu seperti sawit, karet, sayur-sayuran, buah-buahan, berbagai jenis makanan khas daerah dan suku tempatan. Umumnya barang yang diperdagangkan merupakan hasil dari pertanian.

## 3. POLRI/TNI

Adapun penduduk yang berprofesi sebagai POLRI/TNI berjumlah 621 jiwa dengan persentase 2,5% (persen). Jika diurutkan, maka rofesi sebagai POLRI/TNI merupakan profesi yang minoritas dan menempati urutan paling akhir di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

## 4. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan mata pencaharian atau profesi yang sangat dipilih masyarakat. Meskipun banyaknya masyarakat yang memilih PNS sebagai mata pencaharian atau profesi mereka, namun

sedikit di antara masyarakat dari jumlah yang boleh bekerja bisa meraihnya. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1.739 dengan persentase 7% (persen).

Umumnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai PNS merupakan masyarakat yang memiliki profesi ganda dalam bidang ekonomi. Karena di satu sisi mereka sebagai PNS, namun di sisi lain mereka juga sebagai petani dan pedagang. Oleh karena itu mata pencaharian ini sangat diminati dan dipilih oleh masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu.

#### 5. Buruh

Adapun masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh berjumlah 3.851 jiwa dengan persentase 15,5% (persen). Berbagai macam jenis mata pencaharian sebagai buruh terdapat di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir seperti buruh pabrik (pabrik sawit) dan buruh kasar (bangunan).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, di samping mata pencaharian sebagai buruh, ada juga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pelayan jasa seperti tukang ojek dan becak.

#### 6. Belum Bekerja

Penduduk yang belum bekerja di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 2.983 jiwa dengan persentase 12 % (persen). Jika diperhatikan penduduk yang belum bekerja dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:



- a. Tahapan masa anak-anak (belum sekolah)
- b. Tahapan masa pendidikan (mulai SD sampai Perguruan Tinggi)
- c. Tahapan masa mencari kerja (sudah selesai pendidikan tapi belum memiliki pekerjaan).

Menurut peneliti khusus tahapan pada masa mencari kerja (selesai pendidikan) dituntut perhatian serius dari Pemerintahan setempat dalam membuka lapangan pekerjaan atau usaha. Karena ketika banyak masyarakat yang tidak bekerja, hal ini berpotensi terjadinya tindakan kriminal di tengah masyarakat. Karena terkait dengan masalah kebutuhan hidup.

#### **F. Sosial Dan Budaya**

Aspek sosial budaya yang terdapat di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berupa kesenian daerah asal suku bangsa yang berdomisili di daerah ini, seperti wayang dan reok dari Jawa, Lukah Gilo dari suku Melayu dan lain sebagainya.

Di samping itu, mayoritas masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu merupakan masyarakat yang kurang percaya dengan benda-benda keramat seperti keris, cincin dan benda-benda pusaka lainnya, yang menurut anggapan sebagian masyarakat benda-benda keramat mampu mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Karena masyarakat di daerah ini senantiasa selalu menggunakan akal pikiran mereka dalam menilai sesuatu. Artinya segala sesuatu yang menurut mereka suatu hal yang logis, maka hal ini pantas atau bisa dikerjakan

begitu sebalik, mereka akan meninggalkan dan tidak mempercayai sesuatu yang dianggapnya tidak logis atau tidak masuk akal.

#### **G. Kondisi Tanah Wakaf Yang Ada Di Kepenghuluan Bagan Batu**

Tanah wakaf yang ada di kepenghuluan bagan batu adalah tanah yang di wakafkan oleh masyarakat dengan berbagai maksud. Adapun status tanah wakaf tersebut tidaklah bersifat resmi karna tidak ada pencatatan terhadap tanah wakaf yang di wakafkan ke masjid. Yang ada hanyalah pengurus mesjid, nazir wakaf dan masyarakat yang mengetahui keberadaan tanah wakaf yang ada di desa mereka<sup>6</sup>. Hal ini terjadi karna kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan terhadap tanah wakaf yang ada. Masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan. Mereka masih melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang ataupun lembaga tertentu. Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di sisi Allah s.w.t tanpa harus melalui prosedur administratif.

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab (Nazir Wakaf), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 21 Juni 2010.

**Tabel 7**  
**DATA PERKEMBANGAN TANAH WAKAF DAN KEGUNAANNYA**  
**KECAMATAN BAGAN SINEMBAH BULAN : DESEMBER**  
**TAHUN : 2009**

No	Ke pe n gh l u a n	Lo ka s i	Suda h sertif ikat	Lu a s m2	Belu m Serti fikt	Lu a s m2	Bentuk dan kegunaan tanah wakaf				
							M a s j i d	L a n g g ar	M u s h	S o s i a l	P e n d
1.	<u>Bagan Bakti</u>	10	1	1350	9	2204	4	-	5	-	1
2	<u>Bagan Batu</u>	9	-	-	9	13824	4	-	3	3	-
3	<u>Bagan Sinembah</u>	10	2	2024	8	7456	4	-	2	2	-
4	<u>Bahtera Makmur</u>	4	1	1385	3	4960	2	-	1	-	1
5	<u>Balai Jaya</u>	8	2	1139	6	3438	2	-	1	1	-
6	<u>Balam Sempurna</u>	6	3	2311	3	2240	2	-	1	-	-
7	<u>Gelora</u>	4	1	960	3	1467	1	-	3	-	-
8	<u>Harapan Makmur</u>	5	-	-	5	3400	3	-	2	-	1
9	<u>Kencana</u>	2	-	-	2	2100	1	-	-	-	1
10	Lubuk Jawi	6	2	3100	4	4511	3	-	2	2	-
<b>Jumlah</b>		<b>64</b>	<b>14</b>	<b>12269</b>	<b>52</b>	<b>45600</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

Sumberdata: Kantor K.U.A Kecamatan Bagan Sinembah tahun 2009

Dari tabel dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan wakaf di Kabupaten Rokan hilir masih minim prosedur. Masyarakat hanya terpaku dengan perintah ibadah wakaf semata tanpa melalui prosedur administratif. Tradisi wakaf seperti ini belakangan menimbulkan perkembangan yang tidak menggembirakan untuk masyarakat banyak.<sup>7</sup> Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau di persengketakan oleh pihak ketiga seperti halnya dalam kasus yang terjadi di Kepenghulan Bagan Batu.

---

<sup>7</sup> *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, op.cit* Hal. 98.

### BAB III

#### KONSEP WAKAF DALAM ISLAM

##### A. Pengertian Dan Dasar Hukum

*Wakaf* berasal dari bahasa Arab dengan asal kata “*waqofa–yaqifu–waqfan* “ mengandung makna berdiri atau berhenti<sup>1</sup>.

Dalam Kamus Istilah Agama Islam Lengkap menjelaskan bahwa Wakaf adalah sesuatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil manfaatnya di jalan kebaikan oleh orang lain, tidak boleh dijual, diberikan dan tidak boleh dipusakakan<sup>2</sup>.

Kata *wakaf* juga ditemukan dalam istilah ilmu tajwid, yaitu menghentikan bacaan pada akhir kalimat, untuk mengambil nafas agar dapat melanjutkan bacaan selanjutnya, atau untuk berhenti terus<sup>3</sup>.

Menurut istilah wakaf juga diartikan dengan menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari ridha allah s.w.t<sup>4</sup>. Oleh karena itu, seseorang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak atas harta tersebut, karena hartanya telah diperuntukkan manfaatnya untuk orang lain.

Sedangkan definisi wakaf dalam terminologi fiqih adalah penahanan pemilik atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), cet. Ke-3, hal. 505.

<sup>2</sup> NA. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Jakarta, Penerbit Indah: 1996), cet. Ke-2, hal. 480.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1984), cet. Ke- 2 hal 207.

Untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridha Allah<sup>5</sup>.

Dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam<sup>6</sup>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan definisi baru tentang wakaf, yaitu Menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset bergerak.) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), dan untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram).<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan adalah wakaf merupakan suatu amalan yang mulia dengan menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki agar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang bersifat lama dan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT.

Wakaf juga merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam Islam; ia merupakan amal shaleh yang pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain (masyarakat).

---

<sup>5</sup>. Al- Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006) cet. Ke-1 jilid 5 hal. 117

<sup>6</sup>. *Kompilasi Hukum Islam*(KHI) Buku III Hukum Perwakafan,(Jakarta; PT Rinneka Cipta,2002) cet. Ke-9 hal.93

<sup>7</sup>. Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat, tanggal 11 Mei 2002 M/ 28 Shafar 1423 H.

Drs. H. Asymuni A. Rahman dkk, memberikan pengertian tentang wakaf adalah menghentikan (manahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT<sup>8</sup>.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan manfaatnya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sementara dalam Pasal 1 Ayat (2) juga disebutkan bahwa waqif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya<sup>9</sup>.

Dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik diterangkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>10</sup>

Harta benda yang sudah diwakafkan tidak dapat digunakan kembali untuk keperluan pribadi atau keperluan anggota keluarga si waqif. Jelasnya pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa harta wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk:

---

<sup>8</sup> Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV. Yuliana, 1986), cet. Ke-2, hal. 207.

<sup>9</sup> Suma, Amin, Muhammad *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) Ed, Rev, cet. Ke-2, hal. 802

<sup>10</sup> Halim, Abd, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005) cet. Ke-2, hal 12

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar, dan
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya<sup>11</sup>.

Pada dasarnya terhadap harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain, dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 225 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 225 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran Majelis Ulama Kecamatan dan Pemerintahan Kecamatan setempat.<sup>12</sup>

Membahas masalah wakaf, Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Rajawali Press, 2007) cet. Ke-1, hal.46

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* , (Jakarta: Rajawali Press, 2005) cet. Ke-5, hal. 126



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”<sup>13</sup>. (TQS. al-Hajj [22]: 77)

Dalil di atas menjelaskan tentang:

1. Perintah kepada mukmin agar senantiasa selalu menghambakan diri hanya kepada Allah SWT semata.

Selanjutnya Allah SWT juga berfirman tentang membahas permasalahan wakaf, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”<sup>14</sup>. (TQS. al-Imran [3]: 92)

Dalil di atas dapat dipahami dan memberikan penjelasan yaitu ada beberapa catatan penting yang menjadi peringatan bagi manusia secara umum dan seorang mukmin khususnya, yaitu :

1. Seseorang tidak akan mendapat *al-birra* (kebaikan) sehingga ia menginfakkan apa-apa yang dicintai sampai kapan pun. Akan tetapi, jika seseorang menginginkan dan mengharapkan *al-birra* (kebaikan) tersebut. ia harus mengeluarkan sesuatu yang dicintai untuk Allah SWT. Ungkapan

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Syamil Cipta Media, 2005), cet. Ke-2, hal. 341.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 62.

“sampai kapan pun” karena permulaan surat al-Imran ayat 92 ditemukan huruf ‘*nashab*’ dan selanjutnya “*fiil mudhari*”.

Dalam Ilmu Tata Bahasa Arab, ketika huruf ‘*nashab*’ dan selanjutnya bertemu dengan “*fiil mudhari*” menyatakan untuk selamanya. Contoh yang sama dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 120<sup>15</sup>.

2. Ayat di atas pada dasarnya bersifat umum dan tidak secara spesifik menjelaskan kata wakaf, tetapi infaq. Namun, berdasarkan beberapa definisi wakaf yang ditemukan di atas secara umum menjelaskan bahwa seseorang mengeluarkan sebagian harta untuk diambil manfaat dari dzatnya dengan tujuan kebaikan.

Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam menjelaskan tentang wakaf; karena seseorang yang mengharapkan kebaikan dari Allah SWT terlebih dahulu ia harus mengorbankan sesuatu yang dicintai demi Allah SWT. Pengorbanan tersebut semata-mata dilakukan demi kecintaan kepada Allah SWT lebih diutamakan dari pada kecintaannya kepada yang lain.

Selanjut sabda Beliau SAW, yang berbunyi:

Di dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda tentang permasalahan wakaf, yang berbunyi:

عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان ابو طلحة اكثر الانصار  
بالمدينة مالا من نخل و كان ا حب امواله اليه بيرحاء قال و كانت حديقة  
م ص و كان رسول الله و كان مستقبل المسجد

---

<sup>15</sup> Ibid. hal. 19.

ب قال انس رضي اللهو يشرب من ماء فيها طي مي دخلها و يستظل فيها  
 قام ابو طلحة تي تنفقو مما تحبون لى تنال البر لا غنه فلم انزلت هذه ا  
 فقال يا رسول الله ان الله تبارك و تعالى الي رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 البر حتى تنفقو مما تحبون يقول في كتابه لن تنال  
 ارجو برها ودخرها عند الله و ان احب اموالي الي بيرحاء و انها صدقة الله  
 فضعا يا رسول الله حيث اراك الله وفي رواية حيث شئت قال فقال  
 ذلك مال رابخ وفي رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم بج يا ابا  
 طلحة راءح في الموضعين  
 وفي اخري راءح وقد سمعت ما قلت فيها قباناه منك ورددناه عليك و اني  
 في الاقربين فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله اري ان تخلها  
 فقسما ابو طلحة في اقاربه وبني عمه قال وكان منهم ابي و حسان قال  
 وباع حسان حصته منه من مغاوية فقيل له تبين صدقة ابي طلحة  
 ابيع صاعا من تمر بصاع من دراهم قال وكانت تلك الحديقة لا ففق قال ا  
 بناه مغاويه في موضع قصر بني خديلة الدي

Artinya: “Dari Anas RA ia berkata: Abu Thalhah adalah seorang golongan Anshar yang terkaya di Madinah, di antara (kekayaannya) berupa kebun korma. Kebunnya yang paling disenanginya ialah *Bairuha*’, yang terletak berhadapan dengan Masjid (Madinah) dan Rasulullah SAW biasa masuk ke dalam kebun itu serta meminum air sumurnya yang bersih dan jernih! Selanjutnya Anas berkata: “Tatkala diturunkan ayat (Ali Imran ayat 92) ini yaitu “*Laa tanaalul birra hatta tunfiquuna mimmaa tuhibbun.....*”, berkata Abu Thalhah kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, bahwasanya Allah tabaaraka wa taa’ala berfirman: *Laa tanaalul birra hatta tunfiquuna mimmaa tuhibbun*, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ialah *Bairuha*’ dan sesungguhnya harta itu aku sedekahkan untuk (jalan) Allah, aku mengharapkan harta itu sebagai bukti yang tersimpan pada Allah, dan aku serahkan kepada Engkau ya Rasulullah untuk menggunakan ketentuan Allah Allah. Rasulullah SAW menjawab: ‘Alangkah besar labanya, itulah harta

yang mempunyai laba, itulah harta yang mempunyai laba, aku telah mendengar ucapanmu, dan menurutku agar harta itu diberikan kepada kerabatmu”. Abu Thalhah berkata: harta itu diberikan kepada kerabatmu”. Abu Thalhah berkata: “aku akan laksanakan ya Rasulullah!” Lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kerabat dan saudara sepupunya”<sup>16</sup>. (HR Bukhari)

نسان ، ما ادم ص رسول الله ن عنه الله رضي هريرة ابي  
علم او رية جا صدقة ثلاثة لا عمله ن عنه انقطع  
بخاري راه له يدعو صالح ولد او به ينتفع

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendo’akannya”<sup>17</sup>. (HR. Bukhari)

Dari hadits di atas, ada beberapa hal yang senantiasa selalu diperoleh (pahala) manusia, meskipun ia telah meninggal dunia, yaitu:

1. Sedekah *jariyah* adalah sedekah harta yang lama atau yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang ridhai Allah SWT; seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah sekolah, membuat saluran imigrasi dan lain sebagainya.

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah *jariyah* dari hadits di atas adalah amalan wakaf<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Imam Az-Zabidi, *Mukhtashor Shaheh al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Drs. Achmad Zaidun dengan judul *Ringkasan Hadits Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. Ke-1, hal. 667.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 670.

<sup>18</sup> Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV. Yuliana, 1986), cet. Ke-2, hal.

2. Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat manusia dan kemanusiaan; seperti Ilmu kedokteran, Ilmu teknik, Ilmu gama dan lain sebagainya.
3. Anak yang shaleh yang selalu mendoakan (ibu dan bapaknya) adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati.
4. Sedekah *jariyah* adalah sedekah harta yang lama atau yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang ridhai Allah SWT; seperti menyedekahkan tanah, mendirikan Masjid, rumah sekolah, membuat saluran imigrasi dan lain sebagainya.  
  
Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah *jariyah* dari hadits di atas adalah amalan wakaf<sup>19</sup>.
5. Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat manusia dan kemanusiaan; seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu agama dan lain sebagainya.
6. Anak yang shaleh yang selalu mendoakan (ibu dan bapaknya) adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati.

## **B. Syarat Dan Rukun**

Adapun syarat dan rukun wakaf adalah sebagai berikut :

1. Yang berwakaf (*waqif*), syaratnya adalah
  - a. Berhak berbuat kebaikan walau bukan Islam sekalipun.
  - b. Dengan kehendak sendiri, tidak sah karena dipaksa orang.

---

<sup>19</sup> *Ibid* hal. 212.

2. Suatu yang diwakafkan
  - b. Kekal zatnya, berarti diambil manfaatnya-dzat barang tidak rusak.
  - c. Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun musya' (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan lain).
3. Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu)
4. Lafadz<sup>20</sup>.

Adapun syarat dari harta yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk selama-lamanya
2. Tidak boleh dicabut
3. Pemilikan tidak boleh dipindah tangankan
4. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya<sup>21</sup>.

Menurut penulis setelah melakukan analisis dari dalil-dalil di atas maka wakaf yang sah adalah ketika memenuhi syarat dan rukun wakaf. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi atau ada, maka waqif akan memperoleh keridhaan dari Allah SWT dan pahala dari-Nya. Sebaliknya, harta yang diwakafkan tidak atau belum memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan di atas, maka bisa dipastikan bahwa wakaf tersebut tidak akan mendatangkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT.

### C. Macam-Macam Wakaf

Jika dilihat di dalam kitab-kitab fiqih dan penjelasan hadits Rasulullah SAW, maka akan ditemukan ada 2 (dua) bentuk pembagian wakaf, yaitu:

#### 1. *Wakaf ahli*

---

<sup>20</sup> *Ilmu Fiqih 3, op.cit*, hal. 225.

<sup>21</sup> Asymuni, *op.cit*, hal. 219.

Wakaf ahli dikenal juga sebagai wakaf keluarga adalah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif. Karena wakaf ahli diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, maka wakaf ini dikenal juga dengan wakaf khusus dan wakaf *adz-dzurri* (wakaf anak cucu)<sup>22</sup>.

## 2. *Wakaf khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang sejak awal penyerahannya diikrarkan manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu atau keluarga saja<sup>23</sup>.

Dari bentuk pembagian wakaf di atas, lebih memberi penjelasan kepada kita dalam melihat dan memperhatikan praktek perwakafan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan jelas arah dan pembagiannya, maka akan lebih memberikan kemudahan kepada kita dalam menemukan status hukum dan pemanfaatan harta wakaf tersebut.

## D. Tujuan Wakaf

Dari beberapa literatur hadits-hadits Rasulullah SAW dan kitab-kitab fiqh karya para ulama, maka akan terlihat jelas tujuan dari wakaf. Ada beberapa tujuan dari wakaf adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari keridhaan Allah SWT, termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam; tujuan ini merupakan tujuan utama dari wakaf, karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk keperluan yang berlawanan dengan kepentingan

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Alih Bahasa Moh Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), cet. Ke-9, hal. 461.

<sup>23</sup> *Ibid.*

agama Islam. Demikian pula harta wakaf tidak dikelola dalam usaha-usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan lain sebagainya.

## 2. Untuk kepentingan masyarakat.

Dari tujuan wakaf di atas, penulis berpandangan bahwa meskipun tidak diterangkan dengan tegas dalam hadits adalah wakaf yang besar pahalanya adalah ialah wakaf dengan tujuan pertama (1) barulah wakaf dengan tujuan yang kedua (2). Wakaf dengan tujuan untuk melaksanakan perbuatan yang mubah yang lain tentulah lebih kurang pahalanya dari kedua tujuan di atas, kecuali hal itu erat hubungannya dengan kepentingan Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan.

## E. Pendapat Ulama Tentang Permasalahan dalam Wakaf

Ada beberapa permasalahan yang terdapat dalam wakaf dan para ulama berbeda pendapat, adalah sebagai berikut:

### 1. Pemilikan Harta Wakaf

- a. Murid Imam Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad; mereka berbeda pendapat dengan gurunya dalam hal ini. Mereka berpendapat ketika terjadi penyerahan wakaf, maka waqif tidak berhak atas harta tersebut; harta wakaf menjadi milik Allah SWT sebagai milik asal dari segala sesuatu<sup>24</sup>.
- b. Menurut Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti mu'abbad dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu (*mu'qqat*). Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan

---

<sup>24</sup> Asymuni, *op.cit.* hal. 223.



kata lain, si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkannya. Harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si wakif, akan tetapi si wakif tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (*ta arruf*) selama masa wakafnya belum habis. Jika dalam ikrar atau ikrar wakaf itu tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya (*mu'abbad*).<sup>25</sup> Landasan hukum yang dijadikan rujukan Imam Malik adalah hadis Ibn 'Umar yang berbunyi:

أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال  
 يا رسول الله اني أصبت أرضاً لم أصب قط مالاً لنفس غدي منه  
 فمأمرني فيه؟ قال ان شئت حبست أصلها وتصدق بها غير على  
 هلا ولا بيع ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق أنه ولا يباع أصل  
 بها عمر في الفقراء وذو القربى والرقاب وابن السبيل. لاجزاح  
 على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول "وفي  
 الترمذي

Artinya: "Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah Saw. meminta untuk mengolahnya seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, tetapi aku

<sup>25</sup> . Abidin, HE. Zaenal. *Wakaf Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet. Ke-1, Hal 111

belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat?" Nabi bersabda: "Jika Kau menginginkannya, tahanlah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Ibn 'Umar menshadaqkannya (mewakafkan tanah Khaibar itu) kepada fakir miskin, karib kerabat, budak (riqab) dan ibn sabil. Tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf itu untuk menggunakannya sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu (mutamawwil). Sedang dalam riwayat lain digunakan lafaz gair mutaa il, yakni tanpa tujuan untuk menguasai harta wakaf itu( Al-Bukhari mentakhrijkan hadist ini dalam "kitab persyaratan" bab tentang persyaratan wakaf)<sup>26</sup>

- c. Imam al-Syafi'i menamakan wakaf dengan istilah *al-adaqat*, *al-adaqat al-muharramat*, *al-sadaqat al-muharramat* *al-mauqufat*.

Selanjutnya ia membagi jenis pemberian ke dalam dua macam, yaitu:

(1) pemberian yang diserahkan si pemberi ketika ia masih hidup dan

(2) pemberian yang diserahkan ketika si pemberi telah wafat. Menurut

pendapat al-Syafi'i, Status hukum wakaf dan *al-'itq*<sup>27</sup> (pembebasan

hamba sahaya) adalah sama berdasarkan qiyâs. Keduanya dianggap

memiliki kesamaan *'illat*,<sup>28</sup> yaitu kemerdekaan dalam *al-'itq* sama

dengan mengeluarkan harta milik dalam perwakafan. Al-Syafi'i

berpegang kepada persamaan antara kedua status hukum institusi

tersebut dari segi adanya bentuk penyerahan benda atau harta itu

kepada Allah sehingga si harta itu menjadi milik Allah. Oleh karena

---

<sup>26</sup> Sarwat, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Yayasan Piara, 2003), cet. Ke-3, hal 135-136.

<sup>27</sup> Pemerdekaan budak adalah pemerdekaan dari status budak dalam fiqh juga di kenal *al-itq saibah* adalah pemberian kemerdekaan secara mutlak dengan menggugurkan seluruh hak pemberi kemerdekaan lihat Said Ghazali Imam, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. Ke-2 hal. 449

<sup>28</sup> *Illat* adalah sebab yang pokok dengan cabangnya lihat H.A Djazuli *Ushul Fiqih Metodologi Hukum islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), cet. Ke-1, hal 131

itu, dalam kedua kasus hukum tersebut terdapat persamaan, yaitu pelepasan milik si wakif sehingga menjadi milik Allah.<sup>29</sup>

- d. Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai *shadaqah* yang kedudukannya sama seperti *ariyah*, yakni pinjam meminjam. Perbedaan antara keduanya terletak pada bendanya. Dalam *ariyah*, benda ada di tangan peminjam yang menggunakan dan mengambil manfaat benda tersebut. Sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan pemilik yang menggunakan dan mengambil manfaat dari benda tersebut dengan demikian benda yang di wakafkan tersebut tetap menjadi milik wakif sepenuhnya. Hanya manfaat saja yang di sedekahkan. Oleh karena itu wakaf tidak mempunyai kepastian hukum kecuali dalam 3 hal:
1. Wakaf Masjid
  2. Apabila hukum wakaf di putuskan oleh hakim
  3. Apabila benda wakaf itu di hubungkan dengan kematian si wakif yaitu wakaf wasiat.<sup>30</sup>

Jika diperhatikan dari pendapat di atas, maka pendapat Imam Hanafi akan menemukan kesulitan; pada saat pemilik (waqif) meninggal dunia, maka siapa yang berhak terhadap harta wakaf tersebut. Jika harta tersebut berpindah kepada ahli waris, maka apakah harta tersebut dibagi sebagaimana harta waris.

Oleh karena itu, jika diperhatikan maka pendapat-pendapat tersebut berpeluang untuk tidak memperoleh kesulitan dikemudian hari, asal

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Ibrahim, M. Anwar. *Wakaf Dalam Syariat Islam*, (Jakarta ; UI Press 2002), cet. Ke-2, hal. 13.

tanah misalnya yang diwakafkan dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan adanya perlindungan dari Negara yang kuat dan aman terhadap harta wakaf tersebut.

## **2. Menukar atau Menjual Harta Wakaf**

Dari penjelasan beberapa hadits, maka hendaklah harta wakaf dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tetapi faktanya harta wakaf berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat dikemudian hari. Habis manfaat atau tidak ada hasil, kemungkinan harta itu menjadi rusak atau karena keadaan dan tempat harta wakaf tidak berfungsi (bermanfaat) lagi. Misalnya Masjid; karena sudah lama maka menjadi rusak; suatu kebun wakaf yang harus dijadikan jalan raya; suatu sekolah karena tidak ada muridnya sehingga bangunan tidak dimanfaatkan (karena terlantar atau rusak).

Beberapa pandangan tentang penukaran atau penjualan harta wakaf adalah sebagai berikut:

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah dalam penukaran atau penjualan harta wakaf adalah sebagai berikut:

1. Apabila harta tersebut berupa masjid, maka tidak di jual atau di kembalikan kepada wakif atau siapapun walaupun masjid tersebut telah rusak. Alasan mereka adalah karna harta itu adalah tetap harta Allah s.w.t. Akan tetapi pihak pengusa boleh membangun masjid atau mengalihkan ke tempat lain. Namun jika tidak, maka tanah wakaf tersebut menjadi amanah pemerintah .
2. Apabila masjid itu rusak dan di khawatirkan akan runtuh maka penguasa harus memperbaikinya, akan tetapi jika harta wakaf

berupa buah-buahan atau hewan maka di khawatirkan akan hilang manfaatnya maka boleh di jual dan hasilnya di berikan untuk kemaslahatan ummat.<sup>31</sup>

- b. Demikian juga menurut murid-murid syafi'i mereka berpendapat bahwa apabila di wakafkan pohon kurma kemudian kering atau binatang ternak kemudian tidak bermanfaat dalam hal ini ada dua pendapat:
  1. Tidak boleh di jual seperti halnya mesjid yang telah tersebut hukumnya.
  2. Boleh menjual karna tidak di harapkan lagi memperoleh manfaat daripadanya sehingga menjualnya lebih baik daripada membiarkan atau menelantarkannya.
  3. Apabila sudah di jual maka haruslah hasil dari penjualan di peruntukkan untuk kemaslahatan ummat<sup>32</sup>
- c. Menurut Imam Malik; binatang-binatang wakaf yang telah lemah karena sudah tua umurnya dapat dijual dan dibeli binatang ternak yang lebih bermanfaat.<sup>33</sup>
- d. Ulama Madzhab Hanbali; mereka agak longgar dalam penggantian dan penjualan harta wakaf. Mereka berpendapat boleh menjual Masjid jika masjid itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.<sup>34</sup>
- e. Ulama Hanafiah; lebih banyak memberikan kelonggaran terhadap penggantian dan penjualan harta wakaf selain masjid. Oleh karena

---

<sup>31</sup> Hasanah, Uswatun, *Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002) cet. Ke-1, hal. 215.

<sup>32</sup> Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2002) cet, Ke-2, hal. 154.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Sarwat, Ahmad, *op.cit* hal. 138

itu, penggantian harta wakaf itu mungkin terjadi karena tiga hal, yaitu:

1. Wakaf dalam ikrar menyatakan bahwa dia menunjuk dirinya atau orang atau badan lain untuk mempertukarkan atau menjual harta seandainya diperlukan di kemudian hari. Dalam hal ini wakaf adalah sah dan syaratnya pun adalah sah pula.
  2. Waqif tidak menyatakan hak untuk menjual atau menukar harta wakaf dalam sighat wakaf dahulunya dan tidak memberikan hak itu kepada orang atau badan atau yang lainnya. Ternyata dikemudian hari harta yang telah diwakafkan tidak dapat diambil manfaatnya lagi, maka penggantian atau penjualan hal yang seperti ini diperbolehkan dengan keputusan baik<sup>35</sup>.
  3. Harta wakaf telah memberikan manfaat atau mendatangkan hasil yang melebihi biaya pengolahannya, tetapi ada kesempatannya untuk menukar dengan yang lebih baik dengan harga dan nilai yang sama dengan harta wakaf itu. Dalam hal ini Abu Yusuf membolehkan menukarnya karena tidak mengurangi tujuan wakaf.
- f. Ibnu Taimiyyah; berpendapat menganjurkan penukaran harta wakaf jika tukarannya itu lebih baik dan lebih bermanfaat. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tukaran harta wakaf itu dikarenakan dua hal yang mendorongnya, yaitu:
- 1) Penukaran itu diperlukan (hajat)

---

<sup>35</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-3, hal. 115-116.

2) Penukaran itu dilakukan untuk kemashlahatan<sup>36</sup>

### 3. Syarat-Syarat dari Wakaf

Dalam sighthat wakaf ada yang menetapkan syarat-syarat terhadap wakafnya. Apabila syarat-syarat penggunaan harta wakaf yang diikrarkan waqif bertentangan dengan ajaran Islam, maka wakaf itu adalah sah, tetapi syaratnya batal.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ada beberapa syarat bagi pewakaf, adalah sebagai berikut:

- a. Syarat bersifat mengikat dan harus dilaksanakan manakala disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan (redaksi wakaf).
- b. Hendaknya syarat yang dicantumkan itu, tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat wakaf, misalnya disyaratkan barang tersebut harus tetap ada pada pemiliknya.
- c. Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi satu hukum syara' Islam, seperti mensyaratkan sesuatu yang haram atau meninggalkan yang wajib<sup>37</sup>.

### 4. Pengelolaan Harta Wakaf

---

<sup>36</sup> Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), cet Ke-3, hal 115.

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Madzhab: Buku Kedua*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), cet. Ke-1, hal. 402-403.

- a. Madzhab Maliki; mensyaratkan terpisahnya harta wakaf dari waqif, karena kedudukan waqif hanyalah sebagai pengawas, sedangkan pengelola wakaf diangkat orang atau badan tersendiri.<sup>38</sup>
- b. Madzhab Syafi'i: hak pengelola wakaf berada ditangan orang selain waqif kecuali jika dalam sighat wakaf ditetapkan bahwa waqif sebagai pengelolanya. Jika tidak ditetapkan ada tiga kemungkinan, yaitu:
  - 1) Pengelola tetap berada pada waqif, karena dialah yang berkepentingan terhadap tercapainya tujuan wakaf.
  - 2) Pengelola itu berada pula pada pemakai manfaat atau hasil wakaf, karena penerima manfaat atau hasil wakaf lah yang paling berkepentingan.
  - 3) Pengawasan itu berada ditangan Hakim atau Pemerintah, karena Pemerintah atau Hakim berkewajiban melindungi hak penerima wakaf, hak waqif dan terhadap kemungkinan terjadinya peralihan status wakaf di kemudian hari.<sup>39</sup>
- c. Madzhab Hanbali; berpendapat bahwa pengelola wakaf ditetapkan diwaktu terjadinya ikrar wakaf, apakah yang diangkat itu waqif atau orang lain<sup>40</sup>.

## 5. Orang yang menerima wakaf

1. Hendaknya orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi.
2. Hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki.

---

<sup>38</sup> Hasanah, Uswatun, *op.cit* hal. 143

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Asymuni, *op.cit.* hal. 228.



3. Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah SWT, seperti tempat pelacuran, tempat-tempat minuman keras, dan para perompak.
4. Hendaknya jelas orangnya dan tidak diketahui<sup>41</sup>.

#### **F. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia.**

Secara yuridis pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1978, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 10 Januari 1978.<sup>42</sup>

Sebelum PP Nomor 28 Tahun 1977, pelaksanaan wakaf di Indonesia didasarkan kepada surat Gouvernement Secretaris Tanggal 31 Januari 1905. Bijblad Nomor 6196 ini disempurnakan dengan Bijblad Nomor 13480 Tanggal 27 Mei 1935. Bijblad ini diketahui dan berlaku pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Indonesia Merdeka, maka Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 Tahun 1950. Peraturan Pemerintah (PP) ini menetapkan kompetensi Departemen Agama tentang pelaksanaan wakaf.<sup>43</sup>

Kemudian Pemerintah menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 27 Mei 1977 yang mengatur perwakafan tanah milik. PP Nomor 28 Tahun 1977 ini merupakan penjabaran dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5

---

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, hal. 398.

<sup>42</sup> Rido, Ali, *Badan Hukum Dan Perkumpulan Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni 1983), cet. Ke-1, hal. 133.

<sup>43</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukannya Di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 2004), cet. Ke-3, hal. 311.

Tahun 1960 pasal 44 ayat 3 yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah, Karena PP Nomor 28 Tahun 1977 ini berhubungan dengan masalah tanah, maka peraturan pelaksanaannya dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik<sup>44</sup>.

#### **G. Pelaksanaan Wakaf di Rokan Hilir**

Adapun pelaksanaan wakaf di Kabupaten Rokan Hilir masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan. Mereka masih melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang ataupun lembaga tertentu. Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di sisi Allah s.w.t tanpa harus melalui prosedur administratif.<sup>45</sup> Hal ini dapat dilihat dari data tanah wakaf yang ada. Sangat sedikit sekali tanah wakaf yang terdaftar di departemen agama dan tersertifikasi.

---

<sup>44</sup> *Ibid* hal. 312

<sup>45</sup> Hamdani, (aparat desa), *wawancara*, Bagan Batu tanggal 18 juni 2010

**BAB IV**

**PEMANFAATAN TANAH WAQAF PERKUBURAN UNTUK  
PERKEBUNAN SAWIT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**A. Faktor Pertimbangan Nazir Wakaf Dalam Pemindahan Fungsi Tanah  
Wakaf Perkuburan Untuk Perkebunan Sawit**

Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu daerah yang agamis dan mayoritas masyarakatnya memeluk Islam. Berdasarkan data yang diperoleh, dimana jumlah masyarakat yang memeluk Islam berdasarkan agama dan keyakinan sebesar 15.105 jiwa dengan persentase 60,79%, dari jumlah masyarakat yang berdomisili di kepenghuluan tersebut<sup>1</sup>.

Jika diamati, masyarakat Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sangat memegang teguh Islam sebagai agama diyakini. Hal ini terlihat dari semangat masyarakat dalam menjalankan berbagai perintah dan pengamalan ibadah yang telah disyari'atkan di dalam Islam. Misalnya, masyarakat memiliki motivasi dalam mendirikan dan memakmurkan masjid, shalat berjama'ah, pengajian rutin masyarakat, dan menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki dalam rangka mengharapkan keridhoan Allah SWT semata.

---

<sup>1</sup> Data Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009.

Dalam menggapai ridho Allah SWT tersebut, berbagai cara yang mereka lakukan karena bagi mereka kehidupan dunia akan ditinggalkan, dan akan menuju kehidupan yang kekal dan abadi yaitu akhirat. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang rela mengorbankan harta benda yang mereka miliki, misalnya wakaf.

Ada beberapa orientasi wakaf yang dilakukan masyarakat Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu;

1. Wakaf pembangunan seperti pembangunan masjid, pembangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA);
2. Wakaf lahan perkuburan, dan lain-lain<sup>2</sup>.

Bentuk wakaf di atas, dilakukan sesuai dengan akad saat penyerahan kepada nazir wakaf (panitia pengelola dan penyaluran wakaf). Misalnya, wakaf untuk lahan perkuburan, maka saat penyerahan diikrarkan sebagai wakaf untuk lahan perkuburan. Bagi pengelola wakaf, hal ini merupakan amanah dari masyarakat kepadanya, dan untuk digunakan dalam rangka kemashlahatan umat.

Di lapangan, penulis menemukan bahwa Pak Wahab(nazir wakaf)<sup>3</sup> Masjid Baiturrahman di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, memanfaatkan harta wakaf lahan perkuburan ke arah yang lebih produktif, dimana beliau mengalihkan

---

<sup>2</sup> Maksum Ihsan (tokoh agama), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 15 Juni 2009.

<sup>3</sup> Di Indonesia orang yang bertanggung jawab mengawasi ,menjaga,memelihara serta mengelola harta wakaf di sebut *Nazir*.Lihat Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3* (Jakarta: IAIN Jakarta,1984), cet. Ke-2, hal. 227

penggunaan harta wakaf tersebut kepada fungsi yang lain. Menurut Abdul Wahab, pengalihan fungsi tersebut supaya harta wakaf tetap bermanfaat dan untuk kemaslahatan umat, yaitu pemanfaatan tanah wakaf perkuburan untuk perkebunan sawit<sup>4</sup>. Dan hal ini pun dilakukan setelah melalui musyawarah dan mufakat dengan pengurus masjid sebagai pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf.

Ada beberapa faktor melatarbelakangi nazir wakaf di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dalam pemanfaatan tanah perkuburan sebagai perkebunan sawit, sebagai berikut:

1. Supaya harta wakaf tetap bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas, disisi lain bagi yang berwakaf tetap memperoleh pahala dan ridha dari Allah SWT.
2. Tanah perkuburan yang selama ini digunakan masyarakat, masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat digunakan untuk penyelenggaraan *fardhu kifayah*, ketika ada masyarakat yang meninggal.

Menurut Abdul Wahab, tanah perkuburan yang saat ini digunakan untuk penyelenggaraan *fardhu kifayah* memiliki luas 5,5 H (hektar). Luas lahan perkuburan yang sudah digunakan untuk perkuburan umum adalah tanah  $\pm 1.5$  ha. Dan ada sekitar  $\pm 2$  ha dan  $\pm 1,5$  H (hektar) yang kosong dan bisa digunakan<sup>5</sup>.

Di sisi lain, kebijakan yang diambil oleh nazir wakaf Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Abdul Wahab (Nazhir Waqaf), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 15 Juni 2009.

pemanfaatan tanah wakaf perkuburan untuk perkebunan sawit bersifat sementara dan bersyarat. Dimana tanah perkuburan digunakan untuk perkebunan sawit, selama tanah perkuburan yang sedang dimanfaatkan, masih bisa digunakan untuk penyelenggaraan *fardhu kifayah* (perkuburan masyarakat). Ketika tanah perkuburan yang sedang digunakan sudah padat dan tidak memungkinkan lagi untuk perkuburan umum, maka tanah wakaf yang pemanfaatannya untuk perkebunan sawit, dikembalikan kepada niat dan fungsi awal para wakif mewakafkan harta tersebut, yaitu untuk perkuburan<sup>6</sup>.

Di samping itu, dalam pelaksanaannya hasil dari pemanfaatan wakaf tanah perkuburan untuk perkebunan sawit, digunakan untuk:

1. Pembangunan fasilitas umum, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam, misalnya pembangunan masjid, rehabilitasi dan renovasi masjid, mendirikan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), dan lain-lain.
2. Operasional masjid, misalnya Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), insentif ta'mir masjid, dan lain-lain<sup>7</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Bu Sutirah, dimana beliau menilai kebijakan nazir wakaf merupakan kebijakan yang mulia, dan patut didukung. Karena pengalihan fungsi tanah wakaf tersebut tidak ada motif individu atau kelompok tertentu, akan tetapi semata-mata menjaga agar si

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid*

wakif tetap memperoleh balasan apa yang telah diwakafkan untuk kemaslahatan umat<sup>8</sup>.

#### **B. Pandangan Masyarakat Terhadap Keputusan Nazir Wakaf Dalam Pemindahan Fungsi Tanah Wakaf Perkuburan**

Sebagaimana dijelaskan di atas, kebijakan nazir wakaf di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, pemanfaatan tanah wakaf perkuburan yang belum digunakan untuk perkuburan umum, akan tetapi digunakan untuk perkebunan sawit, semata-mata bertujuan menjaga supaya harta yang telah diwakafkan oleh si wakif tetap bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam, bukan sebaliknya tidak bermanfaat sama sekali karena tidak dimanfaatkan. Hal ini akan berdampak terhadap balasan yang akan diterima si wakif yaitu pahala. Dimana si wakif akan memperoleh pahala selama hartanya dimanfaatkan, begitu sebaliknya.

Menurut penulis, prinsipnya inilah yang membedakan antara wakaf (*shadaqah jariyah*) dengan infak (*shadaqah biasa*). Infak akan memperoleh pahala dari apa yang telah diberikan hanya pada saat mengeluarkan infak dan tidak berkelanjutan. Sementara wakaf akan memperoleh pahala dari apa yang telah dikeluarkan selama apa yang diwakafkan tetap bermanfaat.

Menurut Bu Sri Ambarwati, ia tidak mempermasalahkan harta wakaf yang telah dikeluarkan dan dialihkan fungsinya kepada fungsi yang lain oleh nazir wakaf seperti untuk perkebunan sawit. Karena sesuatu yang telah diwakafkan semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT, bukan yang lain.

---

<sup>8</sup> Sutirah.Istri alm Bpk. Khairi (Wakif tanah perkuburan), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 16 Juni 2009.

Bahkan kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang mulia. Karena dilihat dari sisi tujuannya, agar kami (si wakif) tetap mendapatkan pahala dari yang telah kami wakafkan<sup>9</sup>.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para wakif tidak mempermasalahkan keputusan yang dilakukan oleh nazir wakaf dalam memanfaatkan tanah wakaf perkuburan untuk perkebunan sawit. Karena sesuatu yang telah diwakafkan semata-mata mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT.

Namun, menurut observasi penulis ditemukan 2 kelompok masyarakat tentang kebijakan nazir wakaf Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dalam pemanfaatan tanah wakaf perkuburan untuk perkebunan sawit, adalah sebagai berikut:

#### 1. Kelompok menerima

Kelompok pertama berpandangan, bahwa kebijakan nazir wakaf merupakan tindakan yang lebih mengutamakan dan mengedepankan kemaslahatan. Hal ini lebih berarti dari pada tanah perkuburan yang telah diwakafkan tidak bermafaat untuk kemaslahatan umat. Pada dasarnya para wakif ketika mewakafkan hartanya untuk lahan perkuburan, karena menurut wakif lahan perkuburan lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat dari pada yang lain. Sementara kenyataannya, setelah diwakafkan lahan tersebut belum dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Di sisi lain, tanah perkuburan yang telah diwakafkan dan digunakan untuk perkebunan sawit, hanya bersifat sementara. Dimana ketika tanah wakaf perkuburan yang sedang digunakan masyarakat sudah padat atau

---

<sup>9</sup> Sri Ambarwati, (wakif tanah perkuburan), *wawancara*, Bagan Batu, Tanggal 16 Juni 2009.



tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan *fardhu kifayah* (perkuburan), maka lahan tersebut kembali kepada tujuan awal wakif saat mengeluarkan wakaf tersebut<sup>10</sup>.

## 2. Kelompok menolak

Sementara kelompok kedua ini berpandangan bahwa kebijakan nazir wakaf di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sudah berbeda dari tujuan awal si wakif dalam mewakafkan tanahnya. Dimana si wakif dalam mewakafkan tanah untuk lahan perkuburan, dan bukan untuk perkebunan sawit. Pandangan ini sebagian besar berasal dari pihak ahli waris (si wakif)<sup>11</sup>. Ahli waris khawatir dengan pemindahan fungsi wakaf dari harta wakaf yang telah dikeluarkan oleh keluarganya tidak bernilai pahala atau sia-sia, karena tidak sesuai dengan akad awal penyerahan wakaf tersebut<sup>12</sup>.

Di samping itu, menurut Hartini Rukhayatun, sesuatu yang telah diwakafkan oleh si wakif tetap dimanfaatkan, meskipun berbeda dengan tujuan awal para wakif. Sementara harta wakaf tersebut tetap digunakan untuk masa-masa mendatang karena tanah wakaf perkuburan yang ada masih bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan perkuburan. selanjutnya, berkaitan dengan pahala yang menentukan dan menetapkan hanya Allah SWT semata, sementara manusia berbuat sesuai dengan apa yang telah

---

<sup>10</sup> Syahidul Haq (Masyarakat), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 16 Juni 2009.

<sup>11</sup> Syaiful Bachri (Ahli Waris), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 15 Juni 2009.

<sup>12</sup> Sugito (Ahli Waris), *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 17 Juni 2009.

disyari'atkan-Nya<sup>13</sup>. Dan masyarakat memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai permasalahan pengalihan fungsi tanah wakaf. Bapak mustoleh berpendapat bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf dari akad asalnya telah merusak nilai pahala dari wakaf itu sendiri karna niat awal wakif adalah untuk lahan perkuburan masyarakat<sup>14</sup>. Bapak Saliman berpendapat bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf tersebut adalah iktikad baik dari pengurus masjid yang ingin memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf perkuburan yang masih belum digunakan karna masih ada tanah wakaf perkuburan yang lain.<sup>15</sup> Bapak Maksum Ihsan berpendapat bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf ini adalah untuk menghindari kesia-siaan dari tanah wakaf yang diwakafkan oleh masyarakat Kepenghuluan Bagan Batu dan hal ini murni bersifat sementara, jika nanti tanah wakaf perkuburan yang ada sudah habis terpakai maka tanah wakaf yang dialihfungsikan ini akan di kembalikan ke fungsi awal yaitu, sebagai tanah perkuburan.<sup>16</sup> Bapak Sugiono berpendapat bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf ini juga memberikan nilai positif dan tidak sepenuhnya menyimpang karna tetap pada dasar awal dari wakaf itu sendiri yaitu kemaslahatan ummat. Hal ini karna tanah wakaf yang dialihkan ke perkebunan sawit tersebut hasilnya digunakan untuk keperluan

---

<sup>13</sup> Hartini Rukhayatun, *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 16 Juni 2009.

<sup>14</sup> Mustoleh( ahli waris) *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 10 Juli 2009

<sup>15</sup> Saliman(Masyarakat) *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 10 Juli 2009

<sup>16</sup> Maksum ihsan(Ketua pengurus Masjid Baiturrahman) *wawancara*, Bagan Batu, tanggal 15 Juli 2009.

masjid juga yang secara tidak langsung berdampak terhadap masyarakat.<sup>17</sup>

Bapak Sukatno berpendapat, bahwa tanah wakaf yang saat ini dialihfungsikan akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat jika mereka mau melihat iktikad baik dari pengurus mesjid, hal ini murni merupakan perbuatan yang baik karna menyelamatkan aset agama (tanah wakaf) dari kerusakan dan kesia-siaan.<sup>18</sup> Bapak Tukiman berpendapat bahwa tanah wakaf yang ada di Kepenghuluan Bagan Batu haruslah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karna jika tidak akan menghilangkan kepercayaan masyarakat yang ingin mewakafkan tanah mereka di jalan Allah s.w.t.<sup>19</sup>

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Alihfungsi Tanah Wakaf

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabaliah membolehkan penggantian atau perubahan pemanfaatan harta wakaf dengan beberapa persyaratan, seperti apabila harta wakaf tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan semula dan atau adanya manfaat yang lebih besar dari wakaf semula. Akan tetapi golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf mesti dipertahankan a'in-nya meskipun telah hancur sebagiannya, sedangkan sebagian lainnya masih dapat dimanfaatkan.<sup>20</sup> Dengan kata lain, menurut golongan Syafi'iyah

---

<sup>17</sup> Sugiono (Masyarakat) wawancara, Bagan Batu, tanggal 10 Juli 2009

<sup>18</sup> Sukatno (Tokoh Masyarakat) wawancara, Bagan Batu, tanggal 10 Juli 2009

<sup>19</sup> Tukiman (Masyarakat) wawancara, Bagan Batu, tanggal 10 Juli 2009

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Madzhab: Buku Kedua*, (Jakarta: BASRIE PRESS, 1994), cet. Ke-1, hal. 405-406.

harta wakaf tidak dapat dialihfungsikan atau dijual dan ganti dengan harta yang lain.

Menurut penulis, pendapat yang membolehkan penggantian dan pengalihanfungsi harta wakaf maupun yang tidak membolehkan penggantian ataupun pengalihfungsian harta wakaf dari tujuan semula, keduanya memiliki sisi positif dan negatif. Pendapat yang membolehkan penggantian harta wakaf dengan syarat bahwa wakaf itu tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan wakaf semula atau adanya manfaat yang lebih besar, secara positif menjadikan harta wakaf bersifat dinamis dan elektis sebagai milik bersama yang harus memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Namun secara negatif, dibolehkannya pengalihfungsian harta wakaf tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan benda-benda wakaf dari keinginan si wakif sejak semula. Hal ini mungkin saja dapat menimbulkan konflik antara pihak wakif atau ahli warisnya dengan pihak nazir (pengelola wakaf). Apabila hal ini terjadi, implikasinya dapat merugikan pihak pemberi wakaf ataupun penerima wakaf itu sendiri. Pendapat yang menyatakan bahwa benda wakaf mesti dipertahankan wujud dan pemanfatannya harus tetap sesuai dengan tujuan yang telah diikrarkan oleh wakif kendatipun sebagian bendanya telah rusak, secara positif memberikan jaminan kelanggengan pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan kehendak si wakif. Namun secara negatif akan menyebabkan harta wakaf tidak dapat dikembangkan atau dilakukan modifikasi agar dapat memberikan

manfaat yang lebih besar demi kepentingan masyarakat umum, dan di samping itu mungkin juga terjadi tindakan penyalahgunaan atau penelantaran harta wakaf karena tidak dapat dimanfaatkan lagi akibat perubahan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat atau akibat perubahan dan kerusakan benda wakaf itu sendiri.<sup>21</sup>

Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam persoalan perubahan harta wakaf, baik dengan dialihfungsikan ataupun dijual dan diganti dengan harta yang lain, bertitik tolak dari pemahaman mereka terhadap dalil wakaf. Dalil wakaf yang secara khusus mengatur tentang perwakafan dan menjadi sumber perbedaan pendapat tersebut adalah hadis riwayat Ibnu Umar yang menceritakan peristiwa wakaf pertama dalam Islam yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khaththab atas sebidang tanahnya di Kaibar. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال

يبرأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بـ

يبر

فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت

أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفس عدي منه فما أأمر به قال إن شئت حبست أصلها

وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في

بـل الله وابن السبيل والضيف لا جناح للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سب

على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير ممنول. قال: فحدثت به ابن سيرين

(غير متماثل مالا). (البخاربرواه

<sup>21</sup> Ali, Marpuji, *Peranan Zakat Dan Wakaf Dalam Membangun Ekonomi Ummat*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2002), cet. Ke-2, hal. 136.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku ibn Umar r.a bahwa: “Umar ibn al-Khaththab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah SAW! Saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara’, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: “Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik”. (H.R al-Bukhari)<sup>22</sup>.

Hadis ini merupakan satu-satunya dalil yang secara khusus membicarakan tentang wakaf, sedangkan dalil-dalil yang lain hanya berbentuk umum. Hadis ini dianggap telah mengatur persoalan wakaf khusus, karena di dalamnya telah tercakup berberapa unsur yang ditetapkan oleh para sebagai rukun-rukun wakaf, yakni adanya pihak yang berwakaf, adanya benda wakaf, adanya pihak penerima wakaf, dan bentuk perbuatan wakaf yakni penahanan asal harta dan penyerahan manfaatnya untuk tujuan wakaf.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ulama bertitik tolak dari pemahaman mereka terhadap makna "penahanan asal harta wakaf" (*in syi'ta habasta ashlaha*). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab

---

<sup>22</sup> Shabih, Muslih, *Terjemahan al-Lu'lu' Wal Marjan, jilid II* (Semarang: Penerbit Al-Rida, 1995), cet. Ke- 1, hal. 393.

sebelumnya, bahwa golongan Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian penahanan asal harta itu adalah, bahwa status kepemilikan benda wakaf tetap berada si wakif tanpa berpindah kepada penerima wakaf, sedangkan yang diberikan itu adalah manfaat benda tersebut. Oleh sebab itu, yang mesti kekal itu adalah manfaatnya bukan bendanya. Namun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa "penahanan asal harta" berarti "pengekalan bendanya". Oleh sebab itu, status kepemilikan terhadap benda wakaf berpindah menjadi milik Allah sejak saat diwakafkan, tidak boleh dilakukan transaksi lagi atas benda wakaf tersebut, baik dengan cara menjual, menghibahkan ataupun mewariskannya. Dengan demikian, baik benda maupun manfaatnya mesti dikekalkan untuk tujuan wakaf.<sup>23</sup>

Terhadap permasalahan di atas, perlu dilakukan penelusuran terhadap apakah kepemilikan harta wakaf itu masih berada di tangan wakif atau berpindah menjadi milik Allah yang pengelolaanya diserahkan kepada nazir. Apabila ditetapkan bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan manfaat benda wakaf saja, sedang wujud bendanya tetap pada kekuasaan si wakif atau ahli warisnya (dalam hal wakif telah meninggal dunia), maka pengalihanfungsi harta wakaf tidak dapat dilakukan kecuali setelah adanya izin dari pihak wakif atau ahli warisnya. Karena dalam hal ini, yang disebut wakaf bukan hartanya melainkan hasilnya. Berdasarkan kepada Sunnah Rasulullah SAW. tentang riwayat Umar ibn al-Khaththab yang tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskan benda wakafnya dan

---

<sup>23</sup>. Usman, Suparman *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2002), cet. Ke-2 hal 167.

tindakan Umar tersebut tidak dilarang oleh Nabi SAW. sehingga dapat ditetapkan sebagai sunnah taqririyah. Namun sunnah taqririyah dapat menjadi sinyal bahwa hukum menahan asal harta dengan tidak menjual, menghibahkan, atau mewariskan adalah mubah, bukan haram ataupun makruh. Sesuatu praktek kehidupan masyarakat yang dibiarkan oleh Nabi SAW. di kala beliau masih hidup, tidak dilarang dan tidak pula diperintakkannya agar dilaksanakan, maka hukumnya adalah mubah. Apabila dilihat pula pemahaman nash secara tekstual, dalam hadis Ibnu Umar terdapat kalimat Rasulullah SAW. yang menyatakan "*in syi'ta, habasta ahslahu wa tashadaqta biha*". Ungkapan tersebut memberikan sinyal bahwa wakaf bukanlah sesuatu yang wajib tetapi berdasarkan kerelaan, dan tidak ada satu pun nash yang secara tegas menunjukkan adanya larangan menjual dan mengganti benda wakaf dengan benda wakaf yang lain.

Berbeda dengan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta lainnya, ibadah wakaf sangat cenderung kepada dapat atau tidaknya harta tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Dalam hal harta wakaf berkurang manfaatnya, atau rusak sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang dituju wakif, harus dicari jalan keluar supaya harta wakaf itu dapat berfungsi secara optimal. Untuk itu seharusnya tidak ada halangan untuk menjual harta wakaf yang tidak berfungsi itu, kemudian ditukar dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.

Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan, bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar



sangat dibutuhkan. Dasar pemikiran Ibnu Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad *fi sabilillah*, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibeli suatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. Kedua, karena kepentingan mashlahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun mesjid baru yang lebih luas atau lebih baik. Dalam hal ini didukung pula oleh tindakan Umar ibn al-Khaththab ketika ia memindahkan mesjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap Masjid Nabawi.<sup>24</sup>

Argumentasi lebih jauh yang dapat diajukan bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu. Hal ini sejalan dengan kaidah:

درء المفاسد مقدم جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan haruslah di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan"<sup>25</sup>

Selain itu, perubahan atau pengalihfungsian harta wakaf tersebut bertujuan untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf,

<sup>24</sup> Ibid Hal. 169

<sup>25</sup> Djazuli ,H.A , *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2000), cet. Ke-1 hal 412.

yaitu untuk kepentingan orang banyak dan kesinambungan. Apabila kita lihat dari segi hakikat pengertian wakaf, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam bahasa Arab berarti “penahanan”. Penahanan memiliki makna ganda, yaitu tidak bermakna hilangnya hak milik pewakaf atas harta tersebut dan makna lainnya penahanan dari tindakan hukum selama diwakafkan. Dari kedua pendapat yang berkembang, yakni jumhur dan Syafi'iyah, sebenarnya dapat digabungkan antara pendapat Hanafiyah dengan pendapat Syafi'iyah dengan mengambil unsur-unsur positif dari masing-masing pendapat mereka dan menghilangkan unsur-unsur yang negatifnya.

Unsur yang positif dalam pendapat Hanafiyah adalah bahwa terhadap benda wakaf masih dapat dilakukan transaksi lain seperti dijual, dihibahkan dan diwariskan, sehingga dengan pendapat ini maka pengalihfungsian harta wakjapun menjadi seustau yang mungkin dilakukan, apalagi untuk kepentingan kemashlahatan yang lebih besar. Unsur positif dalam pendapat Syafi'iyah adalah bahwa harta wakaf itu mesti dipertahankan ain dan manfaatnya. Oleh sebab itu, wakaf itu berpindah kepemilikannya dari hak wakif menjadi hak Allah. Dengan mengambil pendapat ini, maka wakaf dapat dipertahankan kelanggengannya dan tidak dapat ditarik kembali oleh wakif atau ahli warisnya.

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril as, yang mengatur hubungan antara manusia denga Pencipta (*Khaliq*) Allah SWT (masalah

aqidah dan ibadah), dengan dirinya sendiri (makan dan minum, berpakaian dan akhlak) dan mengatur hubungan manusia dengan sesama (mu'amalah dan 'uqubat atau sanksi)<sup>26</sup>.

Dari definisi di atas dipahami bahwa Islam adalah agama dan merupakan pandangan hidup bagi manusia. Karena Islam tidak hanya mengatur masalah ritual (hubungan antara manusia dengan pencipta) ibadah semata. Melainkan berbagai aspek kehidupan. Islam adalah agama yang senantiasa selalu memberikan solusi secara tuntas dari berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk permasalahan tentang wakaf.

Oleh karena itu, selaku seorang muslim harus senantiasa selalu menyatukan dengan dirinya dengan Islam dengan cara tunduk dan taat kepada segala perintah yang diwajibkan dan menyingkirkan setiap yang dilarang oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ  
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”<sup>27</sup>. (TQS. al-Ahzab [33]: 36)

<sup>26</sup> Imam Taqiyuddin, *Nizhamu al-Islam*, terjemahan Abu Yasin dkk dengan judul *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Bogor: Thariful Izzah, 2005), cet. Ke-5, hal. 181.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), cet. Ke-2, hal. 423.

Menurut analisis penulis setelah melihat dari dalil di atas, Allah SWT dengan tegas menerangkan bahwa seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan harus senantiasa selalu menjadikan Islam sebagai pandangan hidup dalam berbagai aspek kehidupan, dan merupakan ancaman baginya berusaha mencari selain Islam sebagai pandangan hidup. Allah SWT menegaskan bahwa sikap yang dilakukan dalam rangka mencari aturan selain Islam merupakan perilaku kesesatan dan seharusnya dihindari

Selanjutnya Allah SWT menerangkan dalam firman-Nya yang lain, ancaman bagi manusia yang meninggalkan Islam secara keseluruhan atau mengamalkan dari sisi tertentu, dengan firman-Nya:

أَفْتُمِئُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ  
ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ  
إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا أَلَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Apakah kamu beriman kepada sebahagian al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat”<sup>28</sup>. (TQS. al-Baqarah [2]: 85)

Dari dalil di atas, dengan tegas sekali Allah SWT memberikan peringatan, ketika Syari’at itu diamalkan sebagian dan mengingkari sebagian, maka kehidupan di dunia saat ini dalam keadaan nista (sulit) dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal. 13.

kehidupan akhirat akan memperoleh adzab yang pedih dari perilakunya yang telah mengamalkan sebagian dan mengabaikannya sebagian yang lain.

Keterikatan seorang muslim terhadap aturan yang telah diturunkan Allah SWT kepadanya merupakan suatu hal yang bersifat mutlak dan tidak merupakan suatu perkara yang bisa ditawar lagi. Hal ini sesuai dengan kaidah Syara' yang berbunyi:

**الأصل في الأفعال التقييد بالحكم الشرعي**

Artinya: “Asal perbuatan manusia terikat kepada hukum syara’”<sup>29</sup>. (Kaidah Syara’)

Adapun dalam masalah pemanfaatan tanah wakaf perkuburan yang diserahkan waqif kepada *nazir* wakaf di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir merupakan suatu permasalahan berkembang di tengah masyarakat. Permasalahan tersebut harus segera ditemukan status hukum Islam. Karena permasalahan tersebut menurut penulis di satu sisi mengundang datangnya konflik di kalangan masyarakat sebagaimana permasalahan yang telah diungkapkan di atas, adanya masyarakat yang menerima dan menolak tentang pemindahan pemanfaatan tanah wakaf perkuburan menjadi perkebunan sawit.

Jika dilihat melalui kaca mata hukum Islam dari permasalahan di atas, maka pemanfaatan tanah wakaf perkuburan menjadi perkebunan sawit tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dilihat dari aspek sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Abdul, Hamid, Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, tth), cet, Ke-3 hal. 29.

1. Keputusan nazir wakaf Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dalam pemanfaatan tanah wakaf perkuburan untuk perkebunan sawit.

Dari aspek ini terlihat bahwa keputusan nazir wakaf dalam pemindahan fungsi wakaf tanah perkuburan menjadi perkebunan sawit melihat bahwa tanah wakaf yang telah diserahkan oleh waqif tidak dimanfaatkan. Karena tanah perkuburan yang ada masih luas dan bisa dimanfaatkan untuk perkuburan massal. Sementara waqif dalam mewaqafkan hartanya bertujuan dalam rangka meraih ridho Allah SWT dan mengharapkan pahala dari-Nya.

Dari sini dapat dilihat bahwa keputusan nazir wakaf tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Karena nazir wakaf yang telah diamanahkan kepadanya harta wakaf, bertanggung jawab menjaga dan merawat harta wakaf tersebut agar waqif tetap memperoleh pahala dari apa yang diwakafkan. Oleh karena itu, pemanfaatan tersebut bertujuan menjaga agar harta wakaf tetap bermanfaat.

2. Pandangan masyarakat dalam pemindahan pemanfaatan tanah wakaf perkuburan menjadi kebun sawit

Sebagaimana dijelaskan di atas, adanya perbedaan kelompok yang mendukung dan menolak tentang keputusan nazir wakaf dalam pemanfaatan tanah perkuburan sebagai perkebunan sawit.

Dari perbedaan tersebut, penulis melihat perlunya dilakukan analisis dari pendapat masyarakat adalah kelompok masyarakat yang menolak keputusan nazir tersebut. Mereka menolak (terutama dari pihak ahli

waris) karena khawatir amalan yang telah dilakukan oleh keluarganya sia-sia dan tidak memperoleh pahala dari sisi Allah SWT.

Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual jika keadaan menghendakinya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dengan membatasi secara ketat dan ada yang tidak. Dari pendapat tersebut hanya Ulama Syafi'iyah yang membatasi secara ketat itu pun boleh dipindahkan fungsi harta wakaf tersebut jika keadaan terpaksa (*dharurat*). Menurut penulis, keadaan terpaksa adalah ketika harta wakaf tidak bermanfaat dan mengakibatkan waqif tidak memperoleh pahala dari harta yang telah diwakafkan.

Sementara Menurut Imam Malik; Ulama Madzhab Hanbali; Ulama Hanafiah; bahkan pendapat Ibnu Taimiyyah sendiri menganjurkan penukaran harta wakaf jika tukarannya itu lebih baik dan lebih bermanfaat. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tukaran harta wakaf itu disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Penukaran itu diperlukan (hajat)
- 2) Penukaran itu dilakukan untuk kemashlahatan

Di samping itu, nazir wakaf dalam membuat keputusan pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan sebagai perkebunan sawit bersifat bersyarat. Artinya, tanah perkuburan yang dijadikan perkebunan sawit dapat dijadikan lokasi perkuburan masyarakat, ketika dibutuhkan nantinya.

Oleh karena itu, adanya kelompok yang menolak keputusan nazir wakaf Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir karena kekhawatiran semata. Sementara niat dan cara yang dilakukan oleh wakif agar pahala dari sesuatu yang dikeluarkan tetap diterima pahalanya selama sesuatu (benda) dimanfaatkan. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Imam Fudhail bin Iyad<sup>30</sup>, 2 (dua) syarat yang harus menyertai setiap amal perbuatan seorang muslim supaya amal yang dilakukan bernilai baik dan memperoleh pahala dari Allah SWT, yaitu niatnya *ikhlas (ayyakuuna lillah)* dan showaban (*ayyakuuna 'ala al-sunnah*)<sup>31</sup>.

Di sini penulis menawarkan beberapa solusi dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Menanamkan pemahaman kepada masyarakat secara umum khusus ahli waris wakif di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan memberikan pemahaman tentang wakaf secara umum, maka dengan pemahaman tersebut kelompok masyarakat yang menolak berdasarkan fakta di atas dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Karena seseorang berbuat dan berperilaku sesuai dengan yang ia pahami. Oleh karena itu, adanya kelompok masyarakat yang menolak karena asumsi penulis mereka belum memahami tentang dibolehkannya di dalam hukum Islam tentang pemindahan fungsi pemanfaatan tanah wakaf dari tujuan semula.

2. Pihak nazir wakaf hendaknya memberikan pengarahan kepada wakif terlebih dahulu sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan.

---

<sup>30</sup> Imam Fudhail bin Iyyad adalah seorang ulama salaf yang pernah dimintai fatwanya oleh Imam Syafi'i, Muhammad al-Khattath, dkk, *Taqorrun Ilallah*, (Bogor: Thariqul Izzah, 2001), cet. Ke-1, hal. 5.

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 7.



Di sini, pihak nazir wakaf dituntut untuk memberikan penjelasan kepada para waqif yang ingin berwakaf. Jika yang diwakafkan itu sesuatu yang berkemungkinan tidak bisa dimanfaatkan untuk saat itu atau baru bisa dimanfaatkan untuk rentang waktu yang masih lama. Maka nazir wakaf diharapkan dapat memberikan pengarahan kepada waqif untuk mewakafkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum dalam waktu dekat atau seketika. Misalnya, waqif hanya memiliki tanah dan diniatkan untuk perkuburan, sementara lahan perkuburan masih bisa dimanfaatkan untuk waktu yang masih lama, maka nazir mengarah waqif menjual tanah wakaf dan hasilnya dapat digunakan untuk kemashlahatan ummat seperti pembangunan sekolah, masjid dan lain.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap pemanfaatan tanah perkuburan perkebunan sawit menurut hukum Islam, maka peneliti memperoleh kesimpulan, bahwa permasalahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kesimpulan ini setelah dilihat dari rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Keputusan nazir wakaf Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dalam pemanfaatan lahan perkuburan untuk perkebunan sawit.

Dari aspek ini, peneliti melihat bahwa keputusan nazir wakaf tidak bersifat selama-lamanya dan keputusan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga dan agar waqif tetap memperoleh pahala dan keridhaan dari Allah SWT setelah waqif mengeluarkan sebagian hartanya untuk wakaf.

2. Pandangan masyarakat terhadap keputusan nazir terhadap pemindahan fungsi wakaf tanah perkuburan untuk perkebunan sawit.

Adapun dari aspek ini, ditemukan kelompok masyarakat yang menolak terutama dari ahli waris yang berwakaf. Karena khawatir amalan yang dilakukan keluarganya tidak bernilai pahala dan tidak memperoleh

keridhaan dari Allah SWT. Namun, setelah dilakukan analisis terhadap hukum Islam, dimana ulama sepakat dalam pemindahan fungsi harta wakaf kepada yang lain dalam rangka kemashlahatan masyarakat. Akan tetapi, mereka hanya berbeda pendapat dalam pembatasan tersebut.

3. Para ulama berbeda pendapat tentang pengalihan fungsi tanah wakaf, namun sebagian besar dari mereka seperti ulama hambaliyah, hanafiyah dan malikiyah bersepakat bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf di bolehkan jika memang di perlukan asalkan tidak mengalihkan harta wakaf tersebut ke jalan yang haram. Hanya saja ulama syafiiyah yang sedikit berbeda pendapat.

## **B. SARAN-SARAN**

Melalui karya ilmiah ini penulis memberikan beberapa saran terkait permasalahan yang sedang berkembang di tengah masyarakat Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tentang pemanfaatan tanah wakaf perkuburan untuk perkebunan sawit, yaitu :

1. Masyarakat, hendaknya senantiasa menjadi Islam sebagai pandangan hidup, dan selalu menambah tsaqofah (pemahaman) Islam, diharapkan ke depannya permasalahan pemanfaatan tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan, sementara Islam membolehkannya.
2. Nazir wakaf, bersifat tegas dan selalu selektif serta senantiasa selalu memberikan nasehat terlebih dahulu tentang wakaf.

3. Ulama, diharapkan pengorbanannya dalam memberikan dan menyampaikan pencerahan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami Islam secara utuh.
4. Aparat desa; diharapkan perannya menjadi fasilitator dalam meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat sehingga masyarakat mengetahui, memahami serta mengamalkan Islam tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Bassam ,Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006) cet. Ke-1 jilid 5.
- Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Karya Abditama, 2001, cet. Ke-1.
- Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: CV. Yuliana, 1986, cet. Ke-2.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukannya Di Negara Kita*, Bandung: Alumni Tahun 2004 cet. Ke-3.
- Abidin, HE. Zaenal. *Wakaf dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, cet. Ke-1.
- A. Rahman, Asymuni, dkk, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: CV. Yuliana, 1986, cet. Ke-2.
- Al-Alabij, Adijani , *Perwakafan Di Indonesia* Jakarta: Rajawali press, 2005, cet. Ke-3.
- Al-Bani, M. Nasiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005, cet. Ke-3.
- Al-Khattath, Muhammad, dkk, *Taqorrun Ilallah*, Bogor: Thariqul Izzah, 2001, cet. Ke-1.
- Ali, Marpuji, *Peranan Zakat Dan Wakaf Dalam Membangun Ekonomi Ummat*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2002 cet. Ke-2.
- As-Suyuti, Imam, *Tarikh Khulafa'*, penerjemah Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. cet. Ke-3.
- Az-Zabidi, Imam. *Mukhtashar Shaheh al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002. cet. Ke-4
- Baiquni, NA. *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Jakarta, Penerbit Indah, 1996, cet. Ke-2.
- Departemen Agama , *Fiqih Wakaf* Jakarta: Rajawali Press, 2007, cet. Ke-1.
- Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* tahun 2007, Jakarta: Rajawali Press, 2007, cet. Ke-5
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3* Jakarta: IAIN Jakarta, 1984. cet. Ke- 2 .

- Djazuli ,H.A , Drs, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum islam* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000. cet. Ke-1.
- Hakim, Abdul Hamid, tt, *Mabadi' Awwaliyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra,2004. cet. Ke-6
- Hakim , Atang Abd & Mubarak , Jaih . *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2002. cet. Ke-4
- Halim, Abd , *Hukum perwakafan diIndonesia* Ciputat: Ciputat press, 2005, cetakan. ke-2.
- Hasanah, Uswatun ,*Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, cet. Ke-1.
- Ibrahim, M. Anwar. *Wakaf dalam Syariat Islam*, Jakarta ; UI Press 2002 cet. Ke-2.
- J.S. Badudu Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994, cet. Ke-1.
- Karim, Helmi. *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. Ke-3.
- Kompilasi Hukum Islam(KHI) Buku III hukum Perwakafan. Jakarta: PT. Rinneka Cipta ,2002. cet. Ke-2
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih 5 Madzhab: Buku Kedua*, Jakarta: BASRIE PRESS, 1994, cet. Ke-1.
- RI, Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta : Syamil Cipta Media, 2005. cet. Ke-2
- Rifa'i, Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.cet. Ke-1.
- Rido , Ali , *Badan Hukum Dan Perkumpuilaan Perseroan, Perekumpulan ,Koperasi, Yayasan , Wakaf* Bandung : Alumni 1983, cet. Ke-1.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Al-Sunnah*, Alih Bahasa Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1980. cet. Ke-2.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Nabhan Husein, Bandung: Al-Ma'arif, 1987. cet. Ke-1.
- Shabih, Muslih, *Terjemahan al-Lu'lu' Wal Marjan, jilid II* Semarang: Penerbit Al-Rida.1993. cet. Ke-1.

Said, Ghazali, Imam, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. Ke-2

Sultan Muhammad Zain, J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994, cet. Ke-1.

Suma, Amin, Muhammad *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, 2008 Ed, Revisi , cet. Ke-2.

Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 11 Mei 2002 M/ 28 Shafar 1423 H.

Sarwat, Ahmad, *fiqih Muamalah*, Bandung: Yayasan Piara, tahun 2003, cetakan ke-3.

Taqiyuddin, Imam, *Nizhamu al-Islam*, terjemahan Abu Yasin dkk dengan judul *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, Bogor: Thariqul Izzah, 2005, cet. Ke-5.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* Jakarta: Darul Ulum press, 2002. cetakan Ke-2.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989. cet. Ke-3.

\

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	17
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa .....	19
Tabel 3	Sarana Pendidikan .....	21
Tabel 4	Penduduk Berdasarkan Keyikanan (Agama) .....	23
Tabel 5	Sarana Ibadah .....	24
Tabel 6	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	25
Tabel 7	Data Perkembangan Tanah Wakaf.....	31